

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMANTAPAN PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Ajeng Apriliana Nur Icmi
NIM 11102241018

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
MEI 2015**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Pemantapan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta” yang disusun oleh Ajeng Apriliana Nur Icmi, NIM 11102241018 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 2 April 2015

Pembimbing

Dr. Sujarwo, M.Pd
NIP.19691030 2003121 1 001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, 2 April 2015

Yang menyatakan,






Ajeng Apriliana Nur Icmi

NIM 11102241018


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMANTAPAN PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YOGYAKARTA” yang disusun oleh Ajeng Apriliana Nur Icmi, NIM 11102241018 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 April 2015 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Sujarwo, M.Pd	Ketua Penguji		27-04-2015
R.B Suharta, M.Pd	Sekretaris Penguji		30-04-2015
Dr. Ibnu Syamsi	Penguji Utama		29-04-2015

Yogyakarta,
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan.


Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

MOTTO

- Konsep diri yang positif adalah aset utama untuk bisa tampil prima dan percaya diri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki (Eliza Zuzana)
- Pendidikan adalah senjata yang paling hebat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia (Nelson Mandela)
- Perjuangan adalah awal dari kesuksesan namun halangan dan rintangan kunci kesabaran (Penulis)

PERSEMBAHAN

Atas Karunia Allah SWT

Karya ini akan saya persembahkan untuk:

1. Bapak, Ibu tercinta yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya dan memanjatkan do'a – do'a yang mulia untuk keberhasilan penulis dalam menyusun karya ini.
2. Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu besar.
3. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan pengalaman yang luar biasa.

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMANTAPAN PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA
(KUBE) DI BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL YOGYAKARTA**

Oleh
Ajeng Apriliana Nur Icmi
NIM 11102241018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) Penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping kelompok usaha bersama di BBPPKS Yogyakarta, (2) Dampak dari pelaksanaan diklat pemantapan pendamping kelompok usaha bersama di BBPPKS Yogyakarta .

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah penyelenggara diklat, widyaiswara dalam diklat pemantapan pendamping KUBE dan peserta diklat yaitu calon pendamping KUBE yang telah lolos seleksi pendamping KUBE. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah *display* data, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan berbagai sumber/ nara sumber dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE melalui tiga tahapan yaitu perencanaan atau persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE meliputi persiapan awal dengan kegiatan yang mencakup koordinasi, rapat dan konsultasi persiapan, pemanggilan peserta dan penunjukan panitia. Tahap pelaksanaan yaitu tahapan dimana dilaksanakannya proses pembelajaran. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi diklat dibedakan menjadi tiga yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap widyaiswara, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat, (2) Pelaksanaan diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE tergolong baik, peserta mendapatkan ilmu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pendampingan KUBE dan dapat memberikan motivasi kepada anggota KUBE yang ada dalam wilayah dampungannya, (3) Dampak yang dirasakan setelah adanya pelaksanaan diklat pemantapan pendamping KUBE yaitu pengetahuan dan ketrampilan peserta tentang KUBE menjadi bertambah, peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki setelah diklat untuk proses pendampingan.

Kata kunci : *pelaksanaan diklat, pemantapan pendamping KUBE, dampak diklat.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Pemantapan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta” guna memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah berkenan membantu proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan yang baik ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah memperkenalkan saya dalam menyelesaikan skripsi dan studi saya di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah berkenan mengizinkan saya dalam menyelesaikan studi dan memberikan kemudahan di dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, yang tiada hentinya memberikan semangat dan doa kepada saya.
4. Bapak Dr. Sujarwo, M.Pd selaku pembimbing dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang telah memberikan arahan-arahan dan kesabaran dalam membimbing saya.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan.
6. Kepala dan seluruh pegawai Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam saya menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu, Bapak, Kedua kakak saya, serta saudara-saudara saya, yang telah memberikan doa dan semangat dengan tulus ikhlas.
8. Sahabatku Rela, Mareta, Marta, Dita, Listy, Fikri yang telah memberikan doa, inspirasi, persahabatan, dan motivasinya
9. Teman-teman PLS khususnya angkatan 2011 yang telah memberikan banyak pembelajaran hidup selama dikampus.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu saya dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.

Semoga bantuan, doa, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan kepada saya mendapat imbalan dari Allah SWT. Inilah yang dapat penulis berikan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi rekan-rekan PLS, dan para pembaca.

Yogyakarta, 2 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Istilah.....	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	12
1. Pendidikan	12
2. Pelatihan	18
3. Pendidikan dan Pelatihan	26
4. Kemiskinan	34
5. Kelompok Usaha Bersama.....	42
6. Pendamping Kelompok Usaha Bersama.....	47

B. Penelitian Relevan.....	50
C. Kerangka Berfikir.....	52
D. Pertanyaan Penelitian	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	55
B. <i>Setting</i> Penelitian.....	56
C. Subjek Penelitian.....	57
D. Metode Pengumpulan Data	58
E. Teknik Analisis Data.....	61
F. Keabsahan Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Deskripsi Lembaga.....	64
2. Deskripsi Program.....	74
B. Data dan Hasil Penelitian	81
1. Pelaksanaan Diklat Pemantapan Pendamping KUBE.....	81
2. Dampak Diklat Pemantapan Pendamping KUBE.....	105
3. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	110
C. Pembahasan.....	112
1. Penyelenggaraan Program Diklat Pemantapan Pendamping KUBE di BBPPKS Yogyakarta	112
2. Dampak Pelaksanaan Diklat Pemantapan Pendamping KUBE di BBPPKS Yogyakarta	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL

hal

Tabel 1. Pedoman Observasi.....	60
Tabel 2. Daftar nama diklat tahun 2012-2013.....	68
Table 3. Data Sumber Daya Manusia di BBPPKS Yogyakarta.....	155
Table 4. Kurikulum Diklat Pemantapan Pendamping KUBE.....	159

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1. Tahap <i>Assesmen</i>	29
Gambar 2. Kerangka Berpikir.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1. Instrumen Penelitian.....	129
Lampiran 2. Catatan Lapangan.....	137
Lampiran 3. Analisis Data.....	146
Lampiran 4. Data Sumber Daya Manusia BBPPKS Yogyakarta.....	155
Lampiran 5. Kurikulum Diklat Pemantapan Pendamping KUBE.....	159
Lampiran 6. Dokumentasi.....	160
Lampiran 7. Surat-surat penelitian.....	165

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan persoalan klasik yang hingga saat ini masih menjadi problem utama, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan populasi penduduk miskin yang masih cukup besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2014 28,28 juta orang (11,25 %). Menurut Suradi dan Mujiyadi (2009:i) Populasi penduduk miskin sampai saat ini masih sangat besar, dan kemungkinan akan mengalami peningkatan disebabkan oleh terjadinya krisis di dalam negeri, bencana alam di berbagai daerah di Indonesia dan dampak krisis global.

Menurut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan.

Secara umum pada setiap Provinsi nampak bahwa jumlah penduduk fakir miskin di wilayah Kabupaten cenderung lebih banyak dari jumlah penduduk fakir miskin di kota. Dengan kata lain penduduk fakir miskin lebih banyak terdapat di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Departemen sosial RI, 2005, hal 12). Kabupaten di provinsi yang memiliki penduduk fakir miskin cukup besar berada di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang memiliki populasi penduduk fakir miskin di atas 100 ribu jiwa (Departemen Sosial RI, 2005, hal 23). Melihat hal ini mengurangi angka kemiskinan merupakan pekerjaan besar bagi pemerintah.

Indonesia sebagai penganut Negara Kesejahteraan atau *Welfare State* telah memberikan perhatian yang khusus terhadap penanggulangan kemiskinan atau fakir miskin sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 khususnya pasal 34 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara (ayat 1), dan Negara berkewajiban menangani fakir miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial (ayat 3). Dari undang-undang tersebut dapat dilihat kemiskinan terutama yang diderita oleh fakir miskin merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama

dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam pasal 21 ditegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk (a) penyuluhan dan bimbingan sosial (b) pelayanan sosial penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha (c) penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar (d) penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar (e) penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman dan/atau (f) penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha .

Menurut Departemen Sosial RI (2005:18) menyatakan bahwa :

“Masyarakat yang dikategorikan fakir miskin pada dasarnya memiliki kemampuan atau potensi diri sebagai modal dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya walaupun dalam keadaan sangat minim atau terbatas. Fakir miskin secara faktual dapat dilihat bahwa mereka mampu merespon dan mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya”.

Berdasarkan profil kemiskinan yang sifatnya struktural dan multidimensional tersebut maka dapat dikatakan persoalan kemiskinan bentuk solusinya adalah dengan paradigma pemberdayaan. Pemberdayaan fakir miskin menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi fakir miskin yang kurang berdaya, karena program-program yang umum dan berlaku untuk semua masyarakat tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat miskin seperti pemberian beras murah (raskin) tidak semua masyarakat miskin dapat menikmati hal ini dan seringkali bantuan tidak tepat sasaran. Melihat hal tersebut dan sesuai mandat konstitusi, Kementerian Sosial RI sebagai penanggung jawab fungsional dalam pengentasan fakir miskin menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan fakir miskin.

Pemberdayaan yang dimaksud salah satunya dilaksanakan dengan menggunakan media Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kelompok usaha bersama merupakan suatu upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin di perkotaan maupun di pedesaan. Kegiatannya dapat bermacam-macam usaha yang sifatnya sederhana dan dimulai secara kecil-kecilan tapi harus mantap dan terus-menerus seperti usaha beternak ayam, perikanan air tawar, kebun sayur-sayuran, perbengkelan, dll (RB. Khatib, 2008, hal 1). Secara sosial KUBE merupakan upaya menghimpun kepala keluarga fakir miskin untuk melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis. KUBE mampu menjadi media yang dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara timbal balik (*mutual sport*) sehingga pada akhirnya meningkatkan harkat martabat kemanusiaan masyarakat miskin.

Menurut RB. Khatib Pahlawan Kayo (2008:5) menyatakan bahwa :

“Agar usaha ini dapat berjalan dengan baik dan sukses disamping memberikan bantuan berupa modal usaha, seyogyanya pemerintah dan para konglomerat juga diharapkan dapat memberikan bimbingan keterampilan yang memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial menerima bantuan dapat mengembangkan usahanya secara kreatif dan produktif”.

Untuk memenuhi kompetensi peserta pelatihan yang mampu memberikan bimbingan keterampilan dalam memajukan kesejahteraan sosial masyarakat miskin, maka perlu diadakan pelatihan sehingga peserta pelatihan dapat memberikan bimbingan kepada penerima usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama tersebut.

Orang yang dilatih nantinya akan menjadi pendamping KUBE dapat diambil dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Pekerja Sosial Madya (PSM), Pengurus Karang Taruna, Pengurus Organisasi Sosial, dan Relawan Sosial lainnya. Pendamping adalah seseorang yang bertugas mendampingi KUBE dalam membantu, membimbing memotivasi, serta memberikan dukungan kepada KUBE dalam memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi, meningkatkan akses serta pengembangan usaha (Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, 2010,hal 33). Pendamping diharapkan berperan membantu merencanakan program KUBE, membantu memecahkan masalah, pengembangan usaha, serta menjalin akses mendapatkan modal usaha. Berdasarkan hasil studi evaluasi pada umumnya pendamping KUBE belum melaksanakan tugasnya dengan baik, karena kompetensinya masih relatif rendah dan pelatihan pendamping masih belum memadai.

Salah satu upaya dalam membentuk pendamping yang dapat melaksanakan tugas untuk membantu pengelolaan dan pengembangan KUBE, Balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial (BBPPKS) Yogyakarta mengadakan program diklat yang diperuntukkan bagi pendamping KUBE. Balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial (BBPPKS) Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. BBPPKS

Yogyakarta bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial bagi tenaga kesejahteraan sosial pemerintah (TKSP) dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), pengkajian dan penyiapan standarisasi pendidikan dan pelatihan, pemberian informasi serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mustofa Kamil (2010:10) pelatihan merupakan proses yang disengaja atau direncanakan, bukan kegiatan yang bersifat kebetulan atau spontan. Pelatihan merupakan proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang sistematis dan terarah pada suatu tujuan. Pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar yang dilaksanakan di luar sistem sekolah, memerlukan waktu yang relatif singkat, dan lebih menekankan pada praktik. Sehingga dapat dikatakan pelatihan merupakan proses pendidikan yang sistematis dan pembelajarannya menekankan pada kegiatan praktik. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta. Tujuan diklat diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan, baik yang bersifat umum pemerintahan maupun pembangunan, yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat (Wikipedia, 2007). Diklat

sebagai salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam meningkatkan manusia yang terampil.

Pelaksanaan diklat untuk pendamping KUBE menggunakan konsep model pemberdayaan melalui pelatihan dimana proses pembelajaran bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan sikap dan perilaku individu sebagai anggota masyarakat dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan Diklat disusun secara penuh oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kesejahteraan Sosial, BBPPKS berlaku sebagai pelaksana program hal ini menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya waktu pelaksanaan diklat yang tidak teratur dimana diklat akan dilaksanakan jika dana dari pusat turun. Kurikulum diklat KUBE mengikuti kurikulum yang telah disusun oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. Selama ini kendala yang dirasa devisi pelaksanaan program antara lain kedatangan peserta yang tidak tepat waktu dan bagi TKSP SDM yang dikirim untuk mengikuti Diklat merupakan orang yang sama setiap tahunnya.

Pelaksanaan pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif *andragogy* yakni memanfaatkan pengalaman-pengalaman peserta pelatihan sebagai sumber belajar untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pelatihan dengan menggunakan metode curah pendapat, ceramah, tanya jawab, permainan peran, diskusi kelompok dan pleno, studi kasus, dan penugasan atau uji coba. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan memberi keleluasaan bagi penerapan metode *adult*

learning / andragogy, sehingga penyampaian informasi berlangsung secara dialogis yang mengoptimalkan partisipasi dan pemahaman mandiri partisipan.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian yang menekankan tentang pelaksanaan diklat untuk pendamping KUBE untuk mengetahui proses pelaksanaan diklat yaitu penelitian yang berjudul “Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Pemantapan Pendamping Kelompok Usaha Bersama di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta”. Dengan judul ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang muncul dalam proses penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi pendamping kelompok usaha bersama sehingga dapat menjadi bahan perbaikan untuk diklat yang akan dilaksanakan selanjutnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka ditemukan beberapa masalah yang terkait dengan diklat program KUBE, antara lain :

1. Bangsa Indonesia dihadapkan dengan populasi penduduk yang masih cukup besar yaitu 28,28 juta orang (11,25 %).
2. Secara umum pada setiap Provinsi nampak bahwa jumlah penduduk fakir miskin di atas 100 ribu jiwa di wilayah Kabupaten Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
3. Program-program yang umum dan berlaku untuk semua masyarakat tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat miskin.

4. Waktu pelaksanaan diklat tidak teratur dimana diklat akan dilaksanakan jika dana dari pusat turun.
5. Kendala yang dirasa dalam pelaksanaan program antara lain kedatangan peserta yang tidak tepat waktu dan peserta yang dikirim untuk mengikuti diklat merupakan orang yang sama setiap tahunnya.
6. Berdasarkan hasil studi evaluasi pada umumnya pendamping KUBE belum melaksanakan tugasnya dengan baik, karena kompetensinya masih relatif rendah dan penyelenggaraan pelatihan pendamping masih belum memadai.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping KUBE di BBPPKS Yogyakarta maka penelitian kali ini lebih difokuskan pada “Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Pemantapan Pendamping Kelompok Usaha Bersama di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta”. Mengingat akan pentingnya penyelenggaraan diklat dalam menciptakan pendamping KUBE yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan dalam hal pengelolaan dan pengembangan KUBE.

D. Rumusan Masalah

Dari penjabaran masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping KUBE di BBPPKS Yogyakarta?

2. Bagaimana dampak dari penyelenggaraan program diklat di BBPPKS Yogyakarta ?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan :

1. Penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping kelompok usaha bersama di BBPPKS Yogyakarta.
2. Dampak dari pelaksanaan diklat pemantapan pendamping kelompok usaha bersama di BBPPKS Yogyakarta .

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Dapat dijadikan referensi atau bahan kajian dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kelompok usaha bersama.
 - b. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan program kelompok usaha bersama
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, saran, dan memberikan informasi bagi pembaca mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di BBPPKS Yogyakarta.
 - b. Bagi pihak BBPPKS Yogyakarta dan khususnya bagian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat), hasil dari

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan saran mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di BBPPKS Yogyakarta.

G. Definisi Istilah

1. Pendidikan adalah proses transformasi pengetahuan, nilai, dan ketrampilan secara terorganisir dan terus menerus untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada manusia.
2. Pelatihan adalah proses belajar yang direncanakan dan dilaksanakan di luar sistem sekolah yang lebih menekankan pada praktik untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang suatu pekerjaan.
3. Kemiskinan adalah kondisi pada masyarakat yang jauh dari sejahtera dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan karena turun menurun atau struktural atau disebabkan oleh konflik sosial, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bencana alam.
4. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang mana merupakan himpunan dari keluarga miskin yang dibentuk untuk meningkatkan produktivitas anggotanya dan memenuhi kebutuhan anggota.
5. Pendamping yaitu perorangan atau kelompok yang mampu dan memiliki kompetensi untuk mendukung serta mendampingi kelompok-kelompok usaha bersama yang dibentuk dalam mencapai tujuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan telah dimulai sejak manusia berada di muka bumi ini, dengan berkembangnya kehidupan dan peradaban manusia maka perkembangan penyelenggaraan pendidikan sejalan dengan kehidupan manusia. Pendidikan mempunyai peran untuk membentuk pribadi-pribadi manusia menjadi lebih baik dan terarah.

Pendidikan mempunyai beberapa artian diantanya menurut Dwi Siswoyo (2007:25) pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang didalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan, di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat (*life long process*) dari generasi ke generasi. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Menurut Abdullah (2011:125), secara sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaannya.

Istilah pendidikan berarti membimbing atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar anak didik menjadi dewasa. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada individu, namun juga memberikan nilai-nilai yang mampu membentuk kepribadian yang baik dan lebih dewasa.

Menurut Nurani Soyomukti pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Aspek-aspek yang paling sering dipertimbangkan dalam pendidikan yaitu : 1) penyadaran, 2) pencerahan, 3) pemberdayaan, 4) perubahan perilaku.

Secara lebih sederhana UNESCO mendefinisikan pendidikan sebagai proses belajar mengajar yang terorganisir dan terus menerus dirancang untuk mengkomunikasikan perpaduan pengetahuan, skill, dan pemahaman yang bernilai untuk seluruh aktivitas hidup.

Dalam arti sempit, pendidikan hanya mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup kepada generasi yang sedang tumbuh, yang dalam prakteknya identik dengan pendidikan formal di sekolah dan dalam situasi dan kondisi serta lingkungan yang serba terkontrol (Ismaun, 2007:57). Sementara itu Hamid Darmadi (2007:3) berpendapat bahwa pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai yaitu membentuk kemampuan individu mengembangkan dirinya yang kemampuan-kemampuan dirinya

berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai individu.

Dari beberapa pengertian pendidikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan pendidikan adalah proses transformasi pengetahuan, nilai, dan ketrampilan secara terorganisir dan terus menerus untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada manusia. Pendidikan merupakan proses merubah sikap, pola pikir dan menumbuhkan kembangkan potensi-potensi pada diri peserta didik.

b. Unsur-unsur Pendidikan

Dalam melaksanakan pendidikan, penyelenggara pendidikan harus memperhatikan unsur-unsur yang harus ada dalam pendidikan seperti yang diungkapkan oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2001:94) yaitu :

- 1) Komunikasi
- 2) Kesengajaan
- 3) Kewibawaan
- 4) Normatif
- 5) Unsur anak
- 6) Unsur kedewasaan atau tujuan

Dalam proses pendidikan melibatkan banyak hal diantaranya :

- 1) Peserta didik yaitu subjek atau pribadi yang otonom yang diakui keberadaannya.
- 2) Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan untuk peserta didik.
- 3) Interaksi edukatif antar peserta didik dengan pendidik, interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan.

- 4) Materi atau isi pendidikan, terdiri materi inti dan materi muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa, sedangkan materi muatan lokal isinya adalah mengembangkan kebhinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan.
- 5) Konteks yang mempengaruhi pendidikan meliputi Alat dan metode pendidikan yaitu segala sesuatu yang dilakukan atau diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada yang bersifat preventif yaitu bermaksud mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Serta bersifat kuratif yaitu bermaksud memperbaiki. Tempat peristiwa berlangsung (lingkungan pendidikan), biasa disebut tri pusat pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat. (www.academia.edu)

Dari uraian unsur pendidikan diatas dapat diketahui bahwa komunikasi penting ada dalam proses pendidikan. Komunikasi merupakan interaksi timbal balik antara pendidik dan anak didik. Kesengajaan dimaksudkan pendidikan merupakan proses yang diselenggarakan dengan sengaja dan tidak dibuat-buat atau bisa dikatakan penuh kewibawaan. Pendidikan juga perlu mempelajari arti kedewasaan baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam proses pendidikan terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan yaitu subjek yang dibimbing, orang yang membimbing, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode, serta lingkungan pendidikan.

c. Jenis-jenis Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang awam dikalangan masyarakat. Saat ini pemerintah mengusahakan pendidikan mulai dari pendidikan Taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi untuk menjawab apa

yang tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “ mencerdaskan kehidupan bangsa”. Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2001: 96) ada berbagai jenis pendidikan, pendidikan dapat dibedakan atau digolong-golongkan yaitu :

- 1) Menurut tingkat dan sistem persekolahan yaitu tingkat pra sekolah dan sekolah dasar
- 2) Menurut tempat berlangsungnya pendidikan dibedakan menjadi tiga yaitu pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di dalam sekolah, dan pendidikan di dalam masyarakat.
- 3) Menurut cara berlangsungnya pendidikan dibedakan antara pendidikan fungsional dan pendidikan intensional.
- 4) Menurut aspek pribadi yang disentuh ada pendidikan orkes, pendidikan sosial dan pendidikan bahasa.
- 5) Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi pendidikan informal, formal, dan pendidikan non formal.

Dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal terjadi secara hierarkis, terstruktur, berjenjang dan terdapat studi akademik secara umum. Pendidikan nonformal terjadi secara terorganisasi di luar sistem pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar dan dimaksudkan untuk melayani sasaran didik dan belajar yang tertentu. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan

kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan keaksaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan informal dalam proses pembelajaran relatif tidak terorganisasikan dan tidak sistematis, tetapi hal tersebut berarti penting dalam proses pembentukan kepribadian.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pendidikan seperti yang dijelaskan dalam Wikipedia.org diantaranya :

- 1) Pendidikan umum
- 2) Pendidikan kejurusan
- 3) Pendidikan akademik
- 4) Pendidikan profesi
- 5) Pendidikan vokasi
- 6) Pendidikan keagamaan
- 7) Pendidikan khusus

Dari uraian diatas dapat diketahui jenis pendidikan adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan kekhususan tujuan pendidikan dalam suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan diantaranya pendidikan formal yaitu pendidikan yang diselenggarakan pada sekolah-sekolah pada umumnya, pendidikan non formal yaitu kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan keaksaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan informal yaitu pendidikan dalam keluarga berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan

secara sadar dan bertanggung jawab, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan/ atau menjadi ahli ilmu agama, dan pendidikan khusus yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

2. Pelatihan

a. Pengertian

Istilah pelatihan merupakan terjemahan dari kata “*training*” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah akar kata “*training*” adalah “*train*”, yang berarti 1) memberi pelajaran dan praktik (*give teaching and practice*), 2) menjadikan berkembang dalam arah yang dikehendaki (*cause to grow in a required direction*), 3) persiapan (*preparation*), dan 4) praktik (*practice*). Pelatihan memiliki beberapa pengertian menurut Mustofa Kamil (2010: 10) pelatihan merupakan proses yang disengaja atau direncanakan, bukan kegiatan yang bersifat kebetulan atau spontan. Pelatihan merupakan proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana yang terarah pada suatu tujuan. Selain itu pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar yang dilaksanakan di luar sistem sekolah, memerlukan waktu yang relatif singkat, dan lebih menekankan pada praktik.

Menurut Flippo (dalam Ikka Kartika, 2011) pelatihan merupakan suatu usaha pengetahuan dan ketrampilan agar karyawan dapat mengerjakan suatu pekerjaan. Menurut Hani Handoko (2001:104) pelatihan atau *training* dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin. Sedangkan menurut Ikka Kartika A. Fauzi (2011:8) pelatihan didefinisikan sebagai upaya sengaja, terorganisir, sistematis, dalam waktu relatif singkat, dan dalam penyampaian menekankan pada praktik daripada teori.

Menurut Gouzali Saydam (2006:71) suatu pelatihan dapat membantu cara pembelajaran yang lebih efektif dan dapat lebih mendorong serta memperluas motivasi serta wawasan para peserta dalam melakukan tugas sekarang dan masa yang akan datang. Pelatihan memiliki manfaat diantaranya :

- 1) Menambah pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam tugas
- 2) Meningkatkan percaya diri dan menghilangkan rasa rendah diri
- 3) Memperlancar pelaksanaan tugas
- 4) Menambah motivasi kerja untuk pelaksanaan tugas
- 5) Menumbuhkan sikap positif
- 6) Menimbulkan semangat dan kegairahan kerja
- 7) Mempertinggi rasa kepedulian
- 8) Meningkatkan rasa saling menghargai
- 9) Mendorong karyawan untuk menghasilkan yang terbaik
- 10) Mendorong karyawan untuk memberikan pelayanan yang terbaik (Gouzali Saydam, 2006)

Pelatihan memiliki tujuan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan saja melainkan juga mengembangkan

bakat. Menurut Marzuki dalam Mustofa Kamil (2010:11) ada tiga tujuan yang harus dicapai dengan pelatihan yaitu :

- 1) Memenuhi kebutuhan organisasi
- 2) Memperoleh pengertian dan pemahaman yang lengkap tentang pekerjaan dengan standar dan kecepatan yang telah ditetapkan dari dalam keadaan yang normal serta aman.
- 3) Membantu para pemimpin organisasi dalam melaksanakan tugas

Pelaksanaan pelatihan menurut A. Usmara (2006:72) memiliki beberapa tujuan yaitu :

- 1) Agar organisasi berkembang
- 2) Mengembangkan ketrampilan dan kompetensi karyawan
- 3) Memperkuat komitmen karyawan

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan pelatihan adalah proses belajar yang direncanakan dan dilaksanakan di luar sistem sekolah yang lebih menekankan pada praktik untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang suatu pekerjaan. Pelatihan memiliki beberapa manfaat dan tujuan yaitu menambah pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan para peserta pelatihan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ilmu yang disampaikan dalam pelatihan.

b. Komponen dan Prinsip Pelatihan

Dalam pelaksanaan pembelajaran dalam pelatihan memerlukan adanya komponen-komponen yang mempunyai tujuan agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Komponen penyelenggaraan pelatihan menurut Mustofa Kamil (2011:14) yaitu :

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Penyelenggara pelatihan
 - b) Tenaga pengajar / fasilitator / widyaiswara
 - c) Peserta pelatihan
- 2) Kurikulum
- 3) Metode pembelajaran
- 4) Waktu pelaksanaan
- 5) Pelaksanaan praktek kerja lapangan / orientasi lapangan

Pelatihan mencakup tiga aspek pokok yaitu perolehan pengetahuan, ketrampilan, dan pengembangan bakat dalam upaya meningkatkan kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan. Pada dasarnya menurut Sudjana (2001) prinsip pelatihan yaitu :

- 1) Berdasarkan kebutuhan belajar (*learning need based*)
- 2) Berorientasi pada tujuan kegiatan belajar (*learning goals and objectives oriented*)
- 3) Berpusat pada peserta (*participant centered*)
- 4) Belajar berdasar pengalaman (*experiential learning*)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komponen pelatihan memiliki tujuan untuk proses pembelajaran agar berjalan secara efektif. Komponen pelatihan merupakan hal pokok yang harus ada dalam penyelenggaraan pelatihan. Sedangkan dari prinsip-prinsip pelatihan yang telah diuraikan nampak bahwa keterlibatan peserta sangat dibutuhkan, dalam pelatihan pelatih lebih berperan sebagai sumber belajar yang memfasilitasi peserta untuk mencapai tujuan pelatihan.

c. Jenis-jenis Pelatihan

Dalam Instruksi Presiden No.15 tahun 1974 dikenal dua macam pelatihan dilihat dari sudut pandang tujuannya, yaitu pelatihan keahlian dan pelatihan kejuruan. Pelatihan keahlian adalah bagian dari pendidikan

yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya pelatihan ketatalaksanaan. Pelatihan kejuruan adalah bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang pada umumnya bertaraf lebih rendah.

Bentuk pelatihan dapat dipandang dari berbagai sudut misal dari sudut program pelatihan dan jenis pekerjaan, peserta pelatihan dan metode pelatihannya seperti yang dikemukakan oleh Ikka Kartika A. Fauzi (2011:17) yaitu :

- 1) Berdasarkan program dibagi menjadi beberapa kategori yaitu program pengangkatan karyawan baru, program *remedial*, program penataran dan program pembinaan.
- 2) Berdasarkan jenis pekerjaan yaitu pelatihan formal, pelatihan informal, dan pelatihan lain.
- 3) Berdasarkan peserta yaitu pelatihan pengenalan, pelatihan kerja, pelatihan kepada supervisor, dan pelatihan pengembangan.
- 4) Berdasarkan metode pelatihan seperti *case study*, *laboratory training*, *lecture*, dan *programmed learning*.

Dilihat dari cara pelaksanaan pelatihan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelatihan formal dan pelatihan pendidikan luar sekolah. Menurut Gouzali Saydam (2006:83) pelatihan formal adalah pelatihan yang dilaksanakan secara formal (resmi) dan dilakukan dalam kelas. Jenis pelatihan formal yaitu 1) pelatihan mandiri, 2) metode belajar kelas, 3) pelatihan ditempat kerja, 4) sistem magang, 5) pelatihan vestibul, 6) pelatihan laboratorium. Dalam pelatihan pendidikan luar sekolah terdapat

berbagai model-model pelatihan. Model-model tersebut dilihat dari tujuan pelatihan yang kemudian menentukan proses pelatihan. Model-model pelatihan menurut Mustofa Kamil (2010:35) yaitu :

- 1) Model magang atau pemagangan (*apprenticeship training/ learning by doing*)
- 2) Model internship (*internship training*)
- 3) Model pelatihan kerja (*job training*)
- 4) Model pelatihan keaksaraan (*literacy training*)
- 5) Model pelatihan kewirausahaan (*enterprenership training*)
- 6) Model pelatihan manajemen peningkatan mutu (*quality management training*).

Menurut A. Usmara (2006:83) terdapat model pelatihan delapan poin yaitu :

- 1) Pengembangan pola pikir bersama untuk membangun kapabilitas organisasional melalui SDM
- 2) Harus ada suatu komitmen fundamental dan keyakinan dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM
- 3) Aktivitas-aktivitas pelatihan dan pengembangan harus dihubungkan dengan strategi dan sasaran bisnis
- 4) Pelatihan dan pengembangan berfokus pada kebutuhan organisasional yang telah didefinisikan dengan jelas
- 5) Pelatihan dapat meningkatkan keunggulan kompetitis jika karyawan mendapat pengetahuan dan ketrampilan serta mampu menggunakan kompetensinya.
- 6) Penetapan sasaran yang tepat untuk pelatihan berdasarkan perubahan dan hasil yang diinginkan
- 7) Pemerincian spesifikasi-spesifikasi pelatihan
- 8) Pengevaluasian menyeluruh dari pelatihan dan komitmen dari semua partisipan terhadap proses tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pelatihan memiliki beberapa jenis dan model yang dilihat dari sudut pandang tujuan, sudut pandang pendidikan luar sekolah, sudut pandang program pelatihan dan jenis pekerjaan, peserta pelatihan dan metode pelatihannya. Jenis dan model

pelatihan dari berbagai sudut ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk pelatihan.

d. Langkah-langkah Pelatihan

Pelatihan perlu diorganisasikan atau dimanajemen. Dimana fungsi pengorganisasian pelatihan ini untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan. Sudjana (dalam Mustofa kamil 2011:17) mengembangkan sepuluh langkah pengelolaan pelatihan sebagai berikut :

- 1) Rekrutmen peserta pelatihan
- 2) Identifikasi kebutuhan belajar, sumber belajar, dan kemungkinan hambatan
- 3) Menentukan dan merumuskan tujuan pelatihan
- 4) Menyusun alat evaluasi awal dan evaluasi akhir
- 5) Menyusun urutan kegiatan pelatihan
- 6) Pelatihan untuk pelatih
- 7) Melaksanakan evaluasi bagi peserta
- 8) Mengimplementasikan pelatihan
- 9) Evaluasi akhir
- 10) Evaluasi program pelatihan

Menurut Ikka Kartika A. Fauzi (2011:25) tahap-tahap yang digunakan dalam proses pelatihan adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama menyadari kebutuhan
- 2) Tahap kedua menganalisis masalah
- 3) Tahap ketiga menentukan pilihan
- 4) Tahap keempat menyadari suatu pemecahan
- 5) Tahap kelima mengajarkan suatu ketrampilan
- 6) Tahap keenam integrasi dalam sistem

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pelatihan agar berjalan sukses sebagai berikut :

- 1) Menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi, yang sering disebut *need analysis* atau *need assesment*
- 2) Menentukan sasaran dan materi program pelatihan
- 3) Menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan
- 4) Mengevaluasi program

Pelatihan yang berjalan sukses dan baik menurut Mel Silberman (2013:19) yaitu pelatihan yang memiliki delapan kualitas yaitu :

- 1) Tingkat isi yang moderat
- 2) Keseimbangan antara pembelajaran afektif, behavioral, dan kognitif
- 3) Variasi pendekatan pembelajaran
- 4) Kesempatan untuk partisipasi kelompok
- 5) Pemanfaatan keahlian peserta
- 6) Daur ulang kosep dan ketrampilan yang dipelajari sebelumnya
- 7) Pemecahan masalah kehidupan nyata
- 8) Peluang untuk perencanaan masa depan

Dari uraian tentang langkah-langkah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelatihan ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan meliputi rekrutmen peserta, identifikasi kebutuhan belajar, menentukan tujuan pelatihan, menyusun alat evaluasi, menyusun tahapan pelaksanaan pelatihan, pelatihan untuk pelatih, dan selanjutnya melaksanakan evaluasi (*pre test*) bagi peserta. Tahapan pelaksanaan atau tahap inti yaitu melaksanakan proses pembelajaran antara sumber belajar dengan warga belajar. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, evaluasi

dilaksanakan untuk peserta dan evaluasi untuk program pelatihan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pengambilan langkah atau tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh penyelenggara berdasar hasil evaluasi. Pelatihan yang baik adalah pelatihan aktif yang ditandai dengan aktivitas, variasi, dan partisipasi dari para peserta.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Kebutuhan akan peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi pada masa sekarang semakin dirasakan seiring dengan semakin meluas dan semakin rasionalnya hubungan-hubungan manusia dalam tatanan global masyarakat modern. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penguasaan ilmu dan teknologi.

Pendidikan dan pelatihan menurut Mustofa Kamil (2010:10) adalah bagian dari proses belajar yang dilaksanakan di luar sistem sekolah, memerlukan waktu yang relatif singkat, dan lebih menekankan pada praktik. Sedangkan menurut Flippo (dalam Ikka Kartika, 2011) pendidikan dan pelatihan merupakan suatu usaha pengetahuan dan ketrampilan agar karyawan dapat mengerjakan suatu pekerjaan.

Menurut Hariandja (2002:168) ada beberapa alasan penting untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan, yaitu :

- a. Karyawan yang baru direkrut seringkali belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan.
- b. Perubahan-perubahan lingkungan kerja dan tenaga kerja meliputi perubahan dalam teknologi proses seperti munculnya teknologi baru atau metode kerja baru.
- c. Meningkatnya daya saing dan memperbaiki produktivitas

- d. Menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan asosiasi industry dan pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan memiliki beberapa tujuan seperti yang diungkapkan oleh Kemendagri (2013) yaitu :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi
- b. Memantapkan sikap dan semangat
- c. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir.

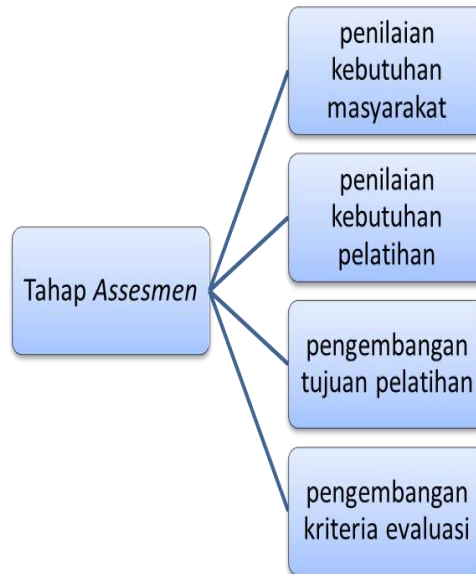
Suatu penyelenggaraan diklat membutuhkan suatu organisasi yang secara manajerial memiliki fungsi organizer pelatihan yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Langkah-langkah penyelenggaraan diklat yaitu :

- a. Perencanaan

Perencanaan diklat dilakukan sebagai langkah awal untuk panduan pelaksanaan dan evaluasi program diklat. Perencanaan yang tepat akan mencapai tujuan yang diharapkan, dimana peserta diklat mendapatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Notoatmodjo (2011) perencanaan diklat memiliki beberapa tujuan yaitu :

- 1) Menentukan secara sistematis tahapan kegiatan diklat yang akan dilaksanakan
- 2) Menentukan aspek-aspek atau unsur yang menjadi fokus pada pelaksanaan diklat
- 3) Menentukan model yang digunakan dalam desain diklat
- 4) Menentukan bahan, media, metode yang digunakan dalam pelaksanaan diklat

Perencanaan diklat menurut Muh. Afroji (2012) mencakup perencanaan kurikulum, silabus, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan evaluasi program. Menurut Roesmingsih (2009:46) perencanaan diklat meliputi : 1) menetapkan tujuan pelatihan, 2) menyusun strategi pelatihan, 3) menentukan metode, 4) menentukan materi, 5) membuat struktur dan prosedur dari diklat (*session plan*). Sedangkan menurut Mustofa Kamil (2010:155) prosedur perencanaan diklat dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan yang menjadi pangkal utama dalam penyusunan program pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kriteria keberhasilan sebagai tolak ukur kesuksesan atau kegagalan suatu pelatihan. Seperti yang digambarkan dalam bagan di bawah ini :



Gambar 1. Tahap *Asesmen*

Keberhasilan penyelenggaraan diklat ditentukan oleh berbagai macam faktor antara lain penentuan tujuan diklat, pengembangan kurikulum, penyusunan program diklat, penetapan peserta dan widyaiswara, penyelenggaraan administrasi, proses pembelajaran dan lingkungan fisik serta lingkungan emosional. Sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Afroji (2012) aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan diklat adalah :

- 1) Target peserta diklat (seleksi peserta)
- 2) Pengembangan panduan diklat, modul, dan perangkat evaluasi diklat
- 3) Uraian tugas penyelenggara diklat
- 4) Penempatan widyaiswara (persyaratan kompetensi, mekanisme seleksi)
- 5) Sarana dan prasarana diklat yang digunakan
- 6) Mekanisme penyediaan dana

Aspek-aspek diatas menunjang efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan diklat. dimana sistem penyelenggaraan diklat yang integral menentukan keberhasilan suatu diklat. oleh karena itu, penyelenggara diklat yang professional harus mampu menyelenggarakan diklat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan diklat merupakan langkah awal dari pelaksanaan dan evaluasi diklat dimana perencanaan diklat bertujuan untuk menentukan secara terinci dan sistematis bagaimana tahapan pelaksanaan diklat. Perencanaan diklat meliputi penentuan tujuan diklat, penentuan materi, penentuan metode, dan penentuan alat evaluasi diklat. Perencanaan diklat merupakan kunci dalam menentukan keberhasilan suatu diklat.

b. Pelaksanaan

Tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah semua proses perencanaan dilakukan yaitu tahap pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan merupakan proses pembelajaran dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh fasilitator dengan peserta pelatihan. Menurut Mustofa Kamil (2010:159) komponen-komponen pelaksanaan diklat yaitu :

- 1) Materi pelatihan
- 2) Pendekatan, metode, dan teknik pelatihan

- 3) Pendanaan program pelatihan
- 4) Penilaian atau evaluasi
- 5) Hasil pelatihan

Menurut AMH Manullang (2006:47) setelah semua perencanaan selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah tahap pelaksanaan diklat yang meliputi :

- 1) Pembukaan dimana acara pembukaan diklat menandakan dimulai kegiatan pelaksanaan diklat. penyelenggara diklat hendaknya menyiapkan beberapa hal seperti : a) mengecek pejabat yang akan membuka dan memberikan arahan, b) menyiapkan petugas dalam acara pembukaan (MC, pembaca doa, dan pembawa tanda pengenal), c) menyiapkan laporan acara pembukaan, d) menyiapkan ruangan dan perlengkapan, e) menyiapkan lingkungan psikologis yang menyenangkan bagi peserta.
- 2) Pelaksanaan proses pembelajaran dimana hal-hal yang perlu disiapkan oleh penyelenggara diklat antara lain adalah : a) mengecek kehadiran peserta, b) menyiapkan sarana prasarana diklat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, c) mengecek kesiapan widyaiswara dalam memberikan materi.

3) Penutupan. Hal-hal yang disiapkan dalam acara penutupan hampir sama dengan acara pembukaan. Penutupan yang meriah akan memberikan kesan yang mendalam bagi diri peserta, yang akan dibawa sampai ke tempat tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan pelaksanaan merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses perencanaan selesai. Secara umum tahapan pelaksanaan meliputi pembukaan diklat, proses pembelajaran dalam diklat, dan penutupan diklat. Tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan diklat harus benar-benar dipersiapkan secara baik agar program diklat yang telah direncanakan dapat tercapai tujuannya.

c. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan terakhir dalam penyelenggaraan suatu program diklat. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada saat sebelum, sedang, atau setelah program dilaksanakan.

Secara umum evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program.

Menurut Efi Dyah Indrawati (2012) dalam konteks evaluasi di lingkungan diklat, terdapat tiga istilah yang memiliki arti berbeda karena tingkat penggunaan yang berbeda, yaitu pengukuran (*measurement*), penilaian (*evaluation*), dan pengambilan keputusan (*decision making*). Pengukuran digunakan untuk mendapatkan informasi atau data secara kuantitatif dengan pemberian angka berdasarkan aturan tertentu. Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui keberhasilan dan keefisienan program, sedangkan pengambilan keputusan atau kebijakan adalah tindakan yang diambil seseorang atau organisasi berdasarkan data dan informasi yang dihimpun.

Menurut Sudjana (2008:7) evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana, dan / atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan.

Dalam melakukan evaluasi program diperlukan teknik-teknik yang tepat. Teknik evaluasi program disebut pula instrumen atau alat pengumpulan data. Menurut Sudjana

(2008:176) teknik-teknik atau alat evaluasi yang dapat digunakan diantaranya : 1) kuesioner (angket), 2) wawancara, 3) pengamatan, 4) teknik respon terinci, dan 5) teknik cawan ikan.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan tahapan terakhir dari penyelenggaraan diklat yang mana evaluasi proses untuk melihat keberhasilan dan keefisienan suatu program. Terdapat tiga konteks evaluasi dalam diklat yaitu pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan evaluasi program teknik atau alat pengukuran yang digunakan yaitu kuesioner, wawancara, pengamatan, teknik respon terinci, dan teknik cawan ikan.

4. Kemiskinan

a. Pengertian

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Negara berkembang. Di Indonesia masalah kemiskinan terus menerus dikaji oleh beberapa ahli karena gejala kemiskinan terus menerus meningkat dari tahun ke tahun.

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan tingkat kerentanan maka kemiskinan dapat diartikan dalam dua hal :

- 1) kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, turun menurun, atau disebut juga sebagai kemiskinan structural. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dikategorikan fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan
- 2) kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan anggota masyarakat secara sementara akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial, korban gempa bumi, korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemiskinan sementara jika ditangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis. (Depsos, 2005)

Kemiskinan menurut Edi Suharto (2013:15) berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Sedangkan menurut Ambar Teguh Sulistyani (2004:27) kemiskinan merupakan keadaan yang jauh dari kondisi sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Orang yang hidup sejahtera tidak lagi berhadapan dengan persoalan memenuhi kebutuhan pokok.

Menurut Kusnadi (2005:37) penyebab kemiskinan penduduk disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ekonomi dan ketidakmampuan penduduk miskin dalam mengelola sumberdaya yang ada, sebagai akibat kurangnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.

Kata kemiskinan dapat disimpulkan memiliki makna yaitu kondisi pada masyarakat yang jauh dari sejahtera dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan karena turun menurun atau struktual atau disebabkan oleh konflik sosial, pemutusan

hubungan kerja (PHK), kurangnya pengetahuan serta ketrampilan untuk mengelola sumberdaya dan bencana alam.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan menurut Edi Suharto (2013:17) disebabkan oleh banyak faktor, secara konseptual bisa diakibatkan oleh empat faktor yaitu :

- 1) Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin.
- 2) Faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
- 3) Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha dan kurang menghormati etos kerja.
- 4) Faktor structural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

Menurut Kusnadi (2005:37) penyebab kemiskinan penduduk disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ekonomi dan ketidakmampuan penduduk miskin dalam mengelola sumberdaya yang ada, sebagai akibat kurangnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.

Sedangkan menurut Sri Umiatun Andayani (2012) bahwa :

“Kemiskinan dipandang sebagai konsekuensi kekayaan dan kekuasaan disatu pihak dan menumbuhkan rasa terpinggirkan di lain pihak. Selain itu kemiskinan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi, kerusakan lingkungan, dan seterusnya.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu kurangnya pengetahuan serta ketrampilan untuk mengelola sumberdaya, bencana alam, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan ketimpangan pada kekayaan serta kekuasaan.

c. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi khususnya pendapatan dalam bentuk materi maupun non material. Namun demikian secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang serba kekurangan, kekurangan pendidikan, kondisi kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi untuk beraktivitas.

Badan Pusat Statistik (2012) menetapkan 14 indikator kemiskinan atau rumah tangga miskin yaitu :

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m₂ per orang
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
- 8) Hanya mengonsumsi daging/ ayam/ susu satu kali dalam seminggu
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun

- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,00 seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Selain indikator yang diuraikan oleh BPS, Suharto (2006:132)

menunjukkan Sembilan kriteria yang menandai kemiskinan yaitu :

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
- 2) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- 3) Ketidakmampuan dan keberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal, dan terpencil)
- 4) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan ketrampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air)
- 5) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan asset), maupun masal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum)
- 6) Ketiadaan akses lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan
- 7) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)
- 8) Ketiadaan jaminan masa depan
- 9) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat

Masalah kemiskinan merupakan isu sentral di Tanah Air yang mana masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalaminya baik itu masyarakat di perkotaan maupun pedesaan. Masyarakat miskin dapat

dilihat dari indikator yang ditetapkan oleh BPS antara lain dari segi fisik bangunan rumah yang tidak memadai dan berkualitas rendah, dari segi kesehatan masyarakat yang termasuk miskin yaitu yang hanya makan satu atau dua kali dan tidak sanggup membayar pengobatan, dari segi pendidikan hanya tamat SD atau tidak menempuh pendidikan sama sekali dan dari segi pendapatan yang hanya bergantung pada satu kepala rumah tangga.

d. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan. Melihat hal ini maka pemerintah melakukan beberapa strategi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Menurut Departemen Sosial RI (2005:26) masyarakat yang dikategorikan miskin pada dasarnya memiliki kemampuan atau potensi diri sebagai modal dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya walaupun dalam keadaan sangat minim atau terbatas. Potensi sosial yang dimiliki antara lain :

- 1) Pertahanan ruang hidup
ada diantara mereka masih memiliki atau menempati ruang fisik seperti rumah sebagai tempat tinggal keluarga atau tempat aktivitas sosial.
- 2) Ulet dan pekerja keras

Dalam mencari nafkah bekerja secara maksimal walaupun dalam kondisi panas atau hujan contoh pemulung, pedagang asongan, pedagang sayur dipasar, dll.

- 3) Pengetahuan dan ketrampilan
Pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan (beternak, bertenun, bertani, dll)
- 4) Solidaritas sosial
Ikatan kekeluargaan masih berjalan baik (komunitas pemulung)
- 5) Mobilitas yang tinggi
Ruang gerak yang tinggi membuat mereka mampu mempertahankan kehidupan keluarganya walaupun banyak resiko
- 6) Cerdik dan tidak mudah menyerah
Kemampuan membaca peluang bisnis walaupun dalam skala mikro yang berorientasi segmen pasar pada tataran kelas menengah ke bawah.
- 7) Berorientasi ke masa depan
Walaupun mengalami masalah kemiskinan masih memiliki harapan yang lebih baik pada hari yang akan datang.

Strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain :

- 1) Fokus pada penyebab kemiskinan
- 2) Partisipasi sosial
- 3) Pengembangan kewirausahaan
- 4) Pengembangan budaya menabung
- 5) Kemitraan sosial
- 6) Penguatan kapasitas kelembagaan
- 7) Aktualisasi kearifan lokal (Kemensos, 2010)

Selain itu menurut Edi Suharto (2013:47) strategi pemerintah yang dilaksanakan dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui bantuan sosial atau yang kerap disebut juga sebagai bantuan publik dan pelayanan kesejahteraan mencakup tunjangan uang, barang, atau pelayanan sosial yang ditujukan untuk membantu atau melindungi

individu, keluarga, dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup.

Sejak kelahiran sekian abad lalu, pekerjaan sosial (*social work*) telah terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional sehingga strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Menurut Edi Suharto (2010:151) beberapa bentuk program penanganan kemiskinan yaitu :

- 1) Pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial
- 2) Program jaminan, perlindungan, dan asuransi kesejahteraan sosial
- 3) Program pemberdayaan masyarakat
- 4) Program kedaruratan
- 5) Program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan yang akan membawa dampak bagi masyarakat seperti pembentukan kelompok usaha bersama

Menurut Susilo (2003) program penanggulangan kemiskinan yang dapat diterapkan oleh pemerintah di masa mendatang adalah :

- 1) Inklusi sosial
- 2) Masyarakat sebagai subjek pembangunan yang partisipatif
- 3) Demokratisasi dalam otonomi daerah
- 4) Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,
- 5) Pemerintah sebagai fasilitator
- 6) Pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara *bottom up*
- 7) Pembangunan yang berkelanjutan / berwawasan lingkungan
- 8) Penanggulangan kemiskinan berdimensi gender
- 9) Penanggulangan kemiskinan berdasarkan pendekatan wilayah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan strategi-strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang mana melibatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin dan memberdayakan masyarakat dengan melaksanakan kebijakan *bottom up*. Selain itu pemberdayaan masyarakat dapat melalui pengembangan kewirausahaan, pengembangan budaya menabung, kemitraan sosial, membentuk kelompok-kelompok usaha dan aktualisasi kearifan lokal masyarakat setempat.

5. Kelompok Usaha Bersama

a. Pengertian

Kube merupakan suatu upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin di perkotaan maupun pedesaan. Kube merupakan suatu pendekatan dalam upaya pelaksanaan program kesejahteraan sosial guna menanggulangi kemiskinan. Kementerian Sosial RI sebagai penanggung jawab fungsional dalam pengentasan kemiskinan menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan fakir miskin. Pemberdayaan yang dimaksud salah satunya dilaksanakan menggunakan media Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE merupakan suatu upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin di perkotaan maupun pedesaan. KUBE merupakan suatu pendekatan dalam upaya pelaksanaan program kesejahteraan sosial guna menanggulangi kemiskinan.

Menurut Haryati R (2013) kelompok usaha bersama adalah kelompok usaha binaan Departemen Sosial yang dibentuk dari beberapa keluarga binaan sosial untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media untuk membangun kemampuan memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, melaksanakan peran sosial dengan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga miskin, yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi (Kemensos RI, 2010). KUBE selain dapat meningkatkan produktifitas, dapat bertujuan untuk memecahkan masalah yang dialami masyarakat miskin dan dapat digunakan sebagai wadah pengembangan usaha bersama.

Menurut Oetami Dewi (2013) dalam salah satu wawancaranya tentang peran pendamping di daerah tertinggal KUBE dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para kelompok miskin yang meliputi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan.

Hal ini dipertegas oleh Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin (2010 :8) :

“Kelompok Usaha Bersama adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama”.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KUBE adalah salah satu strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang mana merupakan himpunan dari keluarga miskin yang dibentuk untuk mendirikan suatu usaha bersama dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya dan memenuhi kebutuhan anggota.

b. Tujuan

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sarana dan prasarana ekonomi yang disalurkan secara langsung atau melalui bantuan modal usaha yang disalurkan melalui mekanisme perbankan. Menurut Sri Umiatun Andayani (2012) tujuan dari dibentuknya KUBE adalah :

- 1) Meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2) Meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam mencegah dan mengatasi masalah yang terjadi baik dalam keluarga maupun dengan lingkungan sosialnya.
- 3) Meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE dalam melaksanakan peran sosialnya.

Menurut Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin (2010:12)

keberadaan KUBE sangat penting dalam pemberdayaan fakir miskin karena :

- 1) KUBE diperuntukkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, seperti : pendapatan, perumahan, kesehatan, pendidikan, ketrampilan, kepemilikan modal, komunikasi, dan teknologi.
- 2) Memudahkan dalam pembinaan dan monitoring sehingga pemberdayaan fakir miskin lebih efektif dan efisien baik dari segi pembiayaan, tenaga, dan waktu yang digunakan
- 3) Anggota kelompok saling membantu dari berbagai dalam informasi, pengetahuan, ketrampilan, modal, dan lain-lain.
- 4) Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan berpikir para anggota dalam mengelola usaha yang dijalankan
- 5) Mampu menggali serta memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan untuk keberhasilan kelompoknya.
- 6) Menumbuhkembangkan sikap kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kepedulian, kesetiakawanan sosial serta ketrampilan berorganisasi.

Secara lebih ringkas arah yang ingin dicapai dari pembentukan KUBE tersebut untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui upaya peningkatan kemampuan dalam berusaha secara ekonomi dan kemampuan sosial termasuk di dalamnya kesetiakawanan di antara anggota dengan masyarakat sekitar (Istiana Hermawati, 2011).

Dari beberapa uraian tujuan di atas maka dapat diketahui KUBE dibentuk memiliki tujuan untuk memotivasi keluarga fakir miskin yang menjadi anggota KUBE untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan interaksi dan kerjasama antar kelompok, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam mengelola usaha yang dibentuk

sehingga nantinya masyarakat miskin akan berdaya dan angka kemiskinan semakin menurun.

c. Model Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE

Kelompok Usaha Bersama memiliki tujuan untuk menangani masalah kemiskinan yang telah menjadi masalah di Negara Indonesia. Model penanganan kemiskinan melalui KUBE menggunakan pendekatan kelompok. Menurut Haryati R (2013) dasar asumsi model penanganan kemiskinan melalui KUBE yaitu penerima manfaat adalah orang yang memiliki keterbatasan / kekurangan sehingga secara sendiri mereka dianggap tidak mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Penanganan kemiskinan melalui KUBE terbagi dalam beberapa tahapan yaitu :

- 1) Tahap persiapan :
 - a) Pembentukan kelompok yang disesuaikan dengan hasil pemetaan
 - b) Penentuan jenis usaha
 - c) Bimbingan kelompok dengan materi program KUBE, pemberdayaan kelompok
 - d) Penentuan pendamping dan pelatihan pendamping dengan materi metode pekerjaan sosial dengan fokus pada bimbingan kelompok, pengelolaan management usaha, dan kemitraan
- 2) Tahap pelaksanaan :
 - a) Pemberian bantuan
 - b) Pelatihan anggota KUBE untuk manajemen usaha, kemitraan
 - c) Bimbingan kelompok
 - d) Bimbingan usaha kelompok
 - e) Bimbingan pemasaran hasil
 - f) Evaluasi pengembangan KUBE
- 3) Tahap monitoring
- 4) Tahap evaluasi (BAPPENAS, 2005)

Model penanganan kemiskinan melalui KUBE dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kelompok dimana didasarkan pada asumsi bahwa antar anggota kelompok memiliki struktur, pola perilaku, aturan, dan tujuan yang sama. Dalam pelaksanaan program KUBE yang bertujuan untuk menangani kemiskinan terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring, dan tahap evaluasi.

6. Pendamping Kelompok Usaha Bersama

a. Pengertian

Dalam pencapaian pelaksanaan program KUBE maka perlu dilaksanakan bimbingan sosial, vokasional, pendampingan dan pemberian bantuan stimulant usaha ekonomi produktif. Maka dibutuhkan seorang pendamping dalam kelompok-kelompok usaha tersebut. Pendamping menurut Suradi dan Mujiyati (2009 :66) yaitu

“seseorang yang mampu melaksanakan berbagai peranan sosial dalam upaya mendukung penerima program untuk mengelola kube dengan baik. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh pendamping lebih banyak berkaitan dengan kegiatan administratif”.

Pendamping menurut Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin (2010:9) adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi untuk bekerjasama dengan KUBE dalam mengembangkan berbagai gagasan dan aksi untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Pendamping dapat berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),

pengurus karang taruna, pengurus organisasi sosial, dan relawan sosial lainnya.

Pendamping sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KUBE sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimana dijelaskan prinsip dalam pelayanan sosial adalah kepentingan terbaik bagi penerima manfaat sesuai dengan hak asasi manusia, menjunjung tinggi kearifan lokal, partisipasi, kesetiakawanan, profesionalisme, dan berkelanjutan. Sehingga dapat dikatakan seorang pendamping KUBE adalah seseorang yang harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang kesejahteraan sosial.

Pendamping KUBE berdasar uraian di atas dapat disimpulkan yaitu perorangan atau kelompok yang mampu dan memiliki kompetensi untuk mendukung serta mendampingi kelompok-kelompok usaha bersama yang dibentuk dalam mencapai tujuan.

b. Peran Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Sebuah KUBE perlu mendapatkan pendampingan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi, mengembangkan usaha KUBE serta mengakses pasar dan pemodalan. Diharapkan seorang pendamping memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang kelembagaan, sosial serta ekonomi.

Pendamping berperan dalam membantu perencanaan KUBE, pengelolaan, membimbing, memberikan informasi, memotivasi,

menjalin, serta memobilisasi sumber dan potensi yang ada di sekitar KUBE (Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, 2010:33). Pendamping KUBE wajib menjalankan tugas-tugas meliputi menumbuhkan kepercayaan, menciptakan hubungan dengan pihak-pihak di masyarakat, menciptakan kesepakatan, membantu tim KUBE dalam memecahkan masalah dan melakukan perencanaan sebagai proses kegiatan sosial ekonomi melalui pendampingan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan pilihan program bagi peserta KUBE.

Menurut Arif Setyo Utomo (2014) peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama yaitu fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampingi :

- 1) Fasilitator. Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat.
- 2) Pendidik. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.
- 3) Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya.
- 4) Peran-peran teknis. Mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis, pendamping dituntut untuk melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pendamping KUBE memiliki peran untuk mendampingi, membimbing, dan memotivasi peserta KUBE untuk merencanakan hingga melaksanakan program

KUBE. Pendamping KUBE memiliki empat peran utama yaitu fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampingi.

B. Penelitian yang Relevan

1. Hasil penelitian dari Suradi dan Mujiyadi pada tahun 2009 tentang Studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Lima Provinsi. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan diketahuinya aspek konteks, input program pemberdayaan, proses dan produk serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (P2FM-BLPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi P2FM-BLPS termasuk kategori rendah. Berbagai kendala pada implementasi program, yaitu keterlambatan pencairan dana, pendidikan rendah pada warga dampingan sosial, keterbatasan sarana kerja pendamping, kompetensi pendamping masih rendah, pengendalian masih rendah dan adanya intervensi dari otoritas lokal maupun instansi sosial di daerah.

Sedangkan fokus penelitian yang berjudul “penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemantapan pendamping kelompok usaha bersama di BBPPKS Yogyakarta” ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan bagi pendamping kelompok penerima bantuan dari pemerintah yang mana digambarkan dalam penelitian Suradi dan Mujiyadi bahwa keadaan lapangan terkait rendahnya

kompetensi pendamping dari kelompok-kelompok penerima bantuan dari pemerintah.

2. Hasil penelitian dari Sudaryanto pada Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Hotel Semeru Bogor. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan diklat yang dilaksanakan Hotel Semeru Bogor untuk seluruh karyawan dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan diklat dan prestasi kerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan diklat yang diselenggarakan oleh perusahaan sudah baik, hasil analisis menunjukkan bahwa diklat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan karyawan. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti dapat diterima diklat yang dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan.

Sedangkan fokus penelitian yang berjudul “penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemantapan pendamping kelompok usaha bersama di BBPPKS Yogyakarta” ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan bagi pendamping kelompok usaha bersama. Hasil penelitian dari Sudaryanto digunakan sebagai acuan dalam membuat sub bab – sub bab dalam data hasil penelitian yang tercantum di dalam bab empat.

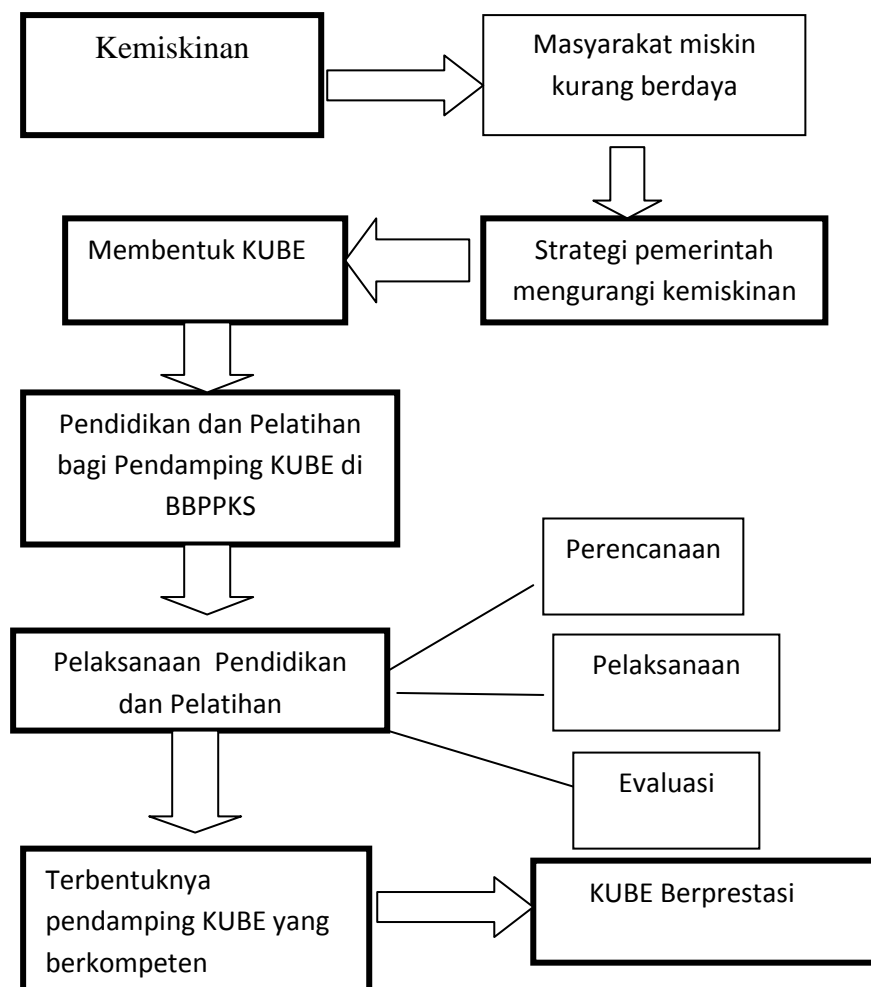
C. Kerangka Berfikir

Kemiskinan adalah kondisi pada masyarakat yang mana tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan karena turun menurun atau struktural atau disebabkan oleh konflik sosial, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bencana alam. Kemiskinan menyebabkan masyarakat menjadi tidak berdaya padahal masing-masing dari masyarakat tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan. Melihat hal ini maka pemerintah memberikan strategi dalam mengurangi kemiskinan dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang anggotanya adalah kepala keluarga yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan.

Dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini dibutuhkan pendamping untuk kelompok yang memiliki kompetensi dan mampu mengembangkan gagasan serta aksi untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Pendamping dapat diambil dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Pekerja Sosial Madya (PSM), Pengurus Karang Taruna, Pengurus Organisasi Sosial, dan Relawan Sosial lainnya. Untuk memantapkan kompetensi pendamping KUBE maka Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Diklat dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan atau kegiatan inti, dan evaluasi. Diklat dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk pendamping KUBE yang berkompeten yang akan mendampingi masing-masing kelompok KUBE untuk menjadi KUBE yang berprestasi. Melihat hal ini peneliti mengangkat judul tentang pelaksanaan diklat agar nantinya hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dan perbaikan dalam pelaksanaan diklat-diklat selanjutnya.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

D. Pertanyaan Penelitian

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, maka peneliti menentukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai acuan dalam proses penelitiannya, adapun beberapa pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan program diklat bagi pendamping KUBE?
 - a. Bagaimana perencanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
 - b. Bagaimana pelaksanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
 - c. Bagaimana evaluasi Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
2. Bagaimana peran pendamping KUBE setelah pelaksanaan diklat?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan diklat bagi pendamping KUBE ?
4. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan diklat?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami masalah sosial atau kemanusiaan dengan membangun gambaran yang kompleks, holistik dalam bentuk narasi, melaporkan pandangan informan secara terinci dan diselenggarakan dalam setting yang alamiah. Seperti yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong (2011:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan baik secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2011:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dari beberapa pengertian tentang penelitian kualitatif tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memahami dan mendalami suatu fenomena dalam masyarakat dengan menggunakan metode alamiah dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan pemantapan pendamping kelompok usaha bersama di BBPPKS Yogyakarta peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini diharapkan penemuan- penemuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, terutama dengan berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan pemantapan pendamping kelompok usaha bersama yang dilakukan sebagai upaya dalam membentuk pendamping yang dapat melaksanakan tugas untuk membantu pengelolaan dan pengembangan KUBE

B. Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta yang beralamat di Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Alasan peneliti memilih Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena lembaga ini telah melaksanakan diklat bagi pendamping kelompok usaha bersama sebagai salah satu upaya dalam membentuk pendamping yang dapat melaksanakan tugas untuk membantu pengelolaan dan pengembangan KUBE.

C. Subjek Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah pihak- pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendamping kelompok usaha bersama. Sedangkan dalam penelitian ini sasarannya adalah penyelenggara

diklat KUBE, widyaiswara, peserta diklat kelompok usaha bersama, dan beberapa anggota kelompok usaha bersama di Rejowinangun, Yogyakarta untuk memperoleh gambaran dan informasi yang lebih jelas. Pihak-pihak yang bisa dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggara diklat BBPPKS Yogyakarta

Untuk menggali informasi tentang penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi serta menggali informasi tentang sarana prasarana, pendanaan, dan pemanfaatan dalam diklat. Metode yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Widyaiswara KUBE di BBPPKS Yogyakarta

Untuk menggali informasi tentang pelaksanaan Diklat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi serta menggali informasi tentang komponen-komponen serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Diklat.

3. Peserta diklat KUBE

Untuk menggali informasi tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Diklat kemudian menggali informasi tentang pendampingan program KUBE

4. Anggota KUBE di Kelurahan Rejowinangun, Yogyakarta

Untuk menggali informasi tentang dampak penyelenggaraan program diklat yaitu bagaimana pengelolaan KUBE, pengembangan, dan prestasi KUBE tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utamanya dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2010:308). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dengan narasumber (*face to face*). Dapat dikatakan juga bahwa wawancara ialah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancara untuk meminta keterangan atau mengenai suatu permasalahan.

Dipilihnya teknik wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikarenakan peneliti berupaya mendapatkan data secara lebih akurat dari narasumber tentang pelaksanaan dan dampak dari adanya diklat bagi pendamping kelompok usaha bersama.

2. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi adalah dasar pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapat data serta informasi bagi penelitian yang relevan.

Teknik observasi digunakan peneliti karena peneliti ingin menggali secara langsung pelaksanaan dan dampak diklat bagi pendamping KUBE.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada baik berupa catatan, buku, surat kabar dan lain-lain. Penggunaan dokumen adalah untuk menambah dan mendukung data serta informasi bagi teknik pengumpulan data yang lain.

Dokumentasi diperlukan untuk lebih memperkaya data yang didapat peneliti, sehingga diharapkan data yang diperoleh peneliti lebih dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya. Bentuk dokumentasi yang akan diambil peneliti dalam memperkuat hasil

penelitian berupa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan diklat dan foto kegiatan pelaksanaan diklat.

Tabel 1. Pedoman Observasi

No	Aspek	Metode	Sumber
1	Identifikasi lembaga BBPPKS Yogyakarta : a. Letak geografis b. Sejarah Berdiri c. Tujuan, visi, dan misi d. Struktur Organisasi	Wawancara, Dokumentasi, Observasi	BBPPKS Yogyakarta
2	Fasilitas : a. Sarana dan Prasarana b. Pendanaan c. Pemanfaatannya	Wawancara, Dokumentasi, Observasi	BBPPKS Yogyakarta
3	Pelaksanaan Diklat : a. Latar Belakang b. Komponen-komponen pendidikan c. Faktor Pendukung dan Penghambat	Wawancara, Dokumentasi, Observasi	Bidang penyelenggara diklat BBPPKS Yogyakarta, Widyaiswara, Peserta diklat KUBE.
4.	Dampak pelaksanaan Diklat : a. Pengelolaan KUBE b. Pengembangan KUBE c. Prestasi	Wawancara, Dokumentasi, Observasi	Peserta diklat KUBE, anggota KUBE di Rejowinangun, Yogyakarta.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction, data display, and data conclusion drawing*

verification (Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono, 2011:246).

Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) :

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya yang sesuai dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data) :

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu peneliti mencari makna dari data yang terkumpul kemudian menyusun pola hubungan tertentu ke dalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan masalahnya. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang ada.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *Credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono

2010:366). Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut William dalam Sugiyono (2010:372) *triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedure*. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Menurut Sugiyono (2010:330) triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda dapat melalui wawancara, dokumen, atau observasi. Triangulasi waktu merupakan pengujian kredibilitas yang mana jika hasil data yang didapat berbeda maka data yang dikumpulkan diuji berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2010:373). Data dalam penelitian kualitatif dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber yang ada. Dasar pertimbangannya adalah bahwa untuk memperoleh satu informasi dari satu responden perlu diadakan *cross* cek antara informasi yang satu dengan informasi yang lain sehingga akan diperoleh informasi

yang benar-benar valid. Informasi yang diperoleh diusahakan dari nara sumber yang betul-betul mengetahui permasalahan dalam penelitian ini. Selain triangulasi sumber, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber yang sama secara serempak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Lembaga

a. Profil Lembaga

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur. Diawali dengan pembentukan Kursus Dinas Sosial Tingkat Menengah (KDSM) pada tahun 1957 di Jl. Mangkubumi Yogyakarta. Peserta KDSM mengikuti pendidikan selama dua tahun dan lulusannya disetarakan dengan lulusan SLTA. Pada tahun 1963 nama KDSM berubah menjadi Kursus Kejuruan Sosial Tingkat Menengah (KKSTM). Lokasi kantor KKSTM berpusat di Jl. Nitipuran, Patangpuluhan Yogyakarta.

Pada Tahun 1975, KKSTM berubah menjadi Kursus Tenaga Sosial (KTS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 10/1975. KTS merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan dan berada di bawah Pusdiklat Pegawai dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Kursus Tenaga Sosial (KTS) berkantor di Jl. Veteran No. 8 Yogyakarta.

Pada tahun 1996 KTS berubah menjadi Balai Diklat Pegawai dan Tenaga Sosial (BDPTS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 27/HUK/1996. Pada Tahun 1997 dilaksanakan pembangunan gedung kantor baru di Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta, dan

sejak 1998 Kantor Pusat BDPTS Yogyakarta berlokasi di Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta.

Pada Tahun 2000 BDPTS berubah menjadi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) Nomor: 08A/HUK/BKSNN/2000, BDPTS dikembangkan lagi menjadi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta merupakan instansi setingkat eselon II sampai saat ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 53/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003 Tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, BBPPKS Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.

BBPPKS Yogyakarta bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah (TKSP) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), pengkajian dan penyiapan standarisasi pendidikan dan pelatihan, pemberian informasi serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Visi dan Misi Lembaga

1) Visi

Dengan mengacu pada komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua serta mencermati berbagai kondisi internal dan eksternal lembaga, maka kondisi ideal yang ingin diwujudkan sebagai sebuah visi BBPPKS Yogyakarta sampai dengan tahun 2015 adalah:

”Menghasilkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang memiliki kesadaran, kepedulian dan kompetensi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”

2) Misi

Untuk mewujudkan sebuah visi tersebut, BBPPKS Yogyakarta merumuskan misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pendidikan dan pelatihan sosial yang mampu memberikan kompetensi, kesadaran, dan kepedulian sosial bagi setiap pesertanya.
- b) Melaksanakan advokasi diklat kesejahteraan sosial yang efektif pada seluruh stakeholder serta pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial yang komprehensif.

c. Sasaran Lembaga

BBPPKS merupakan lembaga yang menyelenggarakan Diklat. Sasaran dari Diklat TKSP adalah para pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai aparatur atau honorer yang ada dilingkungan kementerian

sosial dan dinas sosial propinsi/kabupaten. Sedangkan sasaran dari TKSM adalah pekerja sosial, relawan sosial, pengurus organisasi sosial, karang taruna, dan lain-lain yang ada di enam propinsi yang termasuk dalam naungan BBPPKS Yogyakarta. Enam propinsi tersebut yaitu Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB.

d. Program-Program Diklat Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

Program-program pelatihan di BBPPKS Yogyakarta mempunyai 2 program yaitu diklat untuk pegawai (TKSP) dan untuk masyarakat (TKSP). TKSP diperuntukan pelatihan bagi para Pegawai PNS yang terdiri dari diklat Fungsional (Pekerja Sosial dan Penyuluh sosial) dan manajemen program diklat. Sedangkan TKSM merupakan diklat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang meliputi penanggulangan narkoba, dan pendidikan dasar pelatihan masyarakat.

Program diklat yang terdapat di BBPPKS setiap tahunnya mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan yang dinamis pula, pembuatan program atau perencanaan program melibatkan semua devisi yang ada di BBPPKS dan diseleksi oleh devisi perencanaan diklat sesuai dengan *Training Need Assessment* (TNA). Tugas devisi pelaksanaan program yakni menyiapkan tempat, matrik dan fasilitator. Setiap diklat yang diselenggarakan setiap kelasnya meliputi 30 peserta. Selama ini kendala yang dirasa devisi pelaksanaan program antara lain kedatangan peserta yang tidak tepat waktu dan bagi TKSP SDM yang

dikirim untuk mengikuti Diklat merupakan orang yang sama setiap tahunnya.

Tabel 2. Daftar nama diklat yang diselenggarakan BBPPKS tahun 2012-2013.

NO.	Tahun 2012	
	TKSP	TKSM
1.	Dasar Pekerjaan Sosial Akt I S.D. IV	Pendamping Sosial Program Desa Sejahtera
2.	Asessment Petugas Pantis Sosial Pemerintah	Kader Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tingkat Desa
3.	Kahlian Peksos Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi TKSM
4.	Pekerja Sosial Medis	Menejemen Pelayanan Pantis Sosial Masyarakat
5.	Klinis Konseling Petugas Sosial Pemerintah	Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
6.	Penjenjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Madya	Pencegahan dan Penanganan <i>Trafficking</i> Perempuan Anak Bagi Pendamping KTK_PM
7.	Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Terampil Penyelia	Asesmen Bagi Petugas Pantis Sosial Masyarakat
8.	Penyetaraan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Perencanaan Partisipatif
9.	Pengurus Utamaan Gender Bagi Perencana.	Pendamping Sosial Kecamatan Desa Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Melalui Mekanisme BLPS Akt

NO.	Tahun 2012	
	TKSP	TKSM
10.		Bimbingan Pemantapan Pendamping Kecamatan dan Kelurahan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

NO.	Tahun 2013	
	TKSP	TKSM
1.	Manajemen Pembangunan Kessos	Pendamping Sosial I s.d. III
2.	Analisis Kebijakan Sosial	Sistim Perlindungan Anak
3.	Pemantapan Pandu Gempita I s.d. II	Bimbingan Teknologi LKS Se Wilayah Kota Yogyakarta
4.	Sertifikasi Keahlian Dasar Penyuluh Sosial	Pengembangan SDM Papua
		Pendamping PKH I s.d. XVI
		Pemantapan Supervisor / Pendamping Kube Perkotaan Akt I S.D. VII
		Pemantapan Super Visor / Pendamping Kube Perdesaan Akt I s.d. VII
		Pemantapan Pendamping KUBE PKKH I s.d IX
		Diklat Manajemen Pengelola LKSA

Sumber : Data Primer BBPPKS Yogyakarta

Pada tahun 2014 hingga awal tahun 2015 ini bidang Diklat BBPPKS menyelenggarakan beberapa diklat diantaranya yaitu diklat pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), diklat perlindungan anak dan manajemen pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), diklat pendampingan sosial, diklat Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) pedesaan dan perkotaan. Semua diklat tersebut adalah diklat TKSM. Kegiatan diklat secara garis besar terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Semua tahapan diklat ini merupakan kegiatan manajemen diklat.

e. Sumber Daya Manusia Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

Sumber Daya Manusia di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial mencakup 84 pegawai yang terdiri dari Kepala BBPPKS, Bagian Tata Usaha, Keuangan, Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Penyelenggara Diklat dan Kerjasama, Widyaiswara, dan Pejabat Fungsional. Susunan sumber daya manusia *terlampir*.

Perekrutan pegawai Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui seleksi CPNS yang dilakukan oleh pusat, BBPPKS hanya memberikan daftar pegawai yang diperlukan kepada pemerintah pusat. Peningkatan kualitas SDM sendiri dalam Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) memiliki Program TOT yang disesuaikan dengan keahlian atau ilmu terbaru bagi Widyaiswara.

Selain itu BBPPKS juga mempunyai program tugas belajar bagi para pegawai yang masih S1 untuk menempuh pendidikan S2 secara gratis bagi pegawai dibawah usia 50 tahun dan mereka diberikan bebas kerja dan hanya fokus pada pendidikannya saja.

**f. Sarana dan Prasarana Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial**

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan berbagai diklat dan menunjang bagi pekerjaan pegawai BBPPKS sendiri. Berikut daftar sarana prasarana di BBPPKS Yogyakarta tahun 2014 :

- 1) Gedung Kantor
- 2) Ruang Kelas
- 3) Ruang Diskusi
- 4) Laboratorium Komputer
- 5) Laboratorium Peksos dan Studio Mini
- 6) Ruang Perpustakaan
- 7) Mushola
- 8) Ruang Asrama
- 9) Ruang Aula
- 10) Ruang Makan
- 11) Ruang Panitia
- 12) Ruang Poliklinik
- 13) Ruang Praktek Klinis Konseling
- 14) Rumah Dinas
- 15) Gazebo
- 16) Halaman Olah Raga

17) Ruang Pekerja Sosial

18) Ruang Widyaiswara

g. Fasilitas Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

Fasilitas yang dimiliki Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta untuk menunjang pelaksanaan diklat yaitu :

1) Laboratorium Klinis Konseling Anak dan Keluarga :

Adalah unit khusus yang menangani konsultasi anak dan keluarga. Laboratorium mini tersebut juga menjadi ajang praktek bagi peserta diklat dan juga menerima klien sebagai wahana praktek pekerja sosial yang ada di BBPPKS Yogyakarta.

2) Laboratorium Komputer

Sebagai sarana pembelajaran bagi peserta diklat, khususnya peningkatan keahlian di bidang komputer dan pengetahuan internet.

3) Multimedia Room

Adalah sarana ruang yang disediakan untuk peserta dalam mengikuti proses belajar mengajar yang di dalamnya terdapat fasilitas multimedia dengan tingkat akustik yang baik dan standar serta sebagai sarana hiburan.

4) Media Audio Visual

Adalah seperangkat alat bantu diklat dalam rangka memperlancar kegiatan belajar mengajar. Produk yang dihasilkan adalah film

dokumenter, film pembelajaran diklat, profil lembaga dan spot iklan serta dapat bekerjasama dalam pembuatan film dengan lembaga lain.

5) *Teleconference*

Ini dapat dipergunakan untuk sarana komunikasi bagi seluruh balai diklat di Indonesia dengan kantor pusat Kementerian Sosial RI di Jakarta, bahkan dapat dipergunakan untuk pemberian materi dan pembukaan diklat jarak jauh.

6) *Majalah Empati*

Merupakan media cetak yang diterbitkan setiap 3 bulan dan memuat tentang berbagai informasi kediklatan maupun permasalahan sosial yang diulas secara spesifik. Majalah ini mempunyai motto *empowerment, education* dan *humanity*.

7) *Merapi Outbound*

Merupakan metode pengembangan diri melalui pengalaman dalam bentuk aktivitas luar ruang yang penuh dengan kegembiraan dan tantangan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan mengenal diri, meningkatkan *self confidence* dan *motivation*, menumbuhkan sikap positif, kepemimpinan serta kerjasama.

8) *Radio Komunitas Diklat Kesos FM 107,8*

Sebagai media informasi dan komunikasi bagi humas maupun pekerja sosial yang menginformasikan kegiatan diklat dan info kesejahteraan sosial. Radio ini mampu menjangkau pendengar pada

radius 5 km, selain itu juga sebagai sarana praktek bagi peserta diklat penyuluhan sosial.

2. Deskripsi Program

a. Latar Belakang Penyelenggaraan

Kementerian Sosial selaku instansi Pemerintah yang salah satu bidang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Program Penanggulangan Kemiskinan telah merumuskan serangkaian kebijakan strategis. Di dalam kebijakan tersebut antara lain diatur, bahwa tanggung jawab dalam mewujudkan usaha penanggulangan kemiskinan ada pada pemerintah bersama dengan masyarakat. Masyarakat didorong untuk menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial, sementara itu pemerintah memberikan pembinaan agar usaha tersebut diselenggarakan secara professional.

Penanggulangan kemiskinan perkotaan merupakan salah satu upaya strategis Nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Kementerian Sosial adalah melalui pendekatan pemberdayaan sosial dan ekonomi dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai embrio pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Program tersebut diarahkan untuk menjangkau pemberdayaan masyarakat miskin produktif.

KUBE merupakan wadah aktivitas sosial dan ekonomi warga miskin, yang dibentuk, dikelola, dan dinikmati hasilnya oleh warga miskin itu sendiri. KUBE akan menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan,

sehingga warga miskin mulai mampu untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan tersebut untuk menabung dan membentuk modal. Dalam tingkat makro, kelompok usaha produktif ini akan menjadi media perubahan struktur ekonomi masyarakat yang akan terus berkembang serta merangsang tumbuhnya berbagai bentuk inovasi dan teknik baru dalam masyarakat.

Pada kenyataannya keterbatasan sumber daya yang dimiliki fakir miskin penerima program ini sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Untuk itu dalam rangka memberikan kemudahan kepada fakir miskin sebagai anggota untuk mengelola bantuan stimulant, mempermudah anggota KUBE untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi dibutuhkan pendamping sebagai mediator.

Untuk memenuhi kualitas dan kompetensi pendamping dalam penanggulangan kemiskinan, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional III Yogyakarta mendapat tugas dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan cq Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan untuk melaksanakan Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam kegiatan wawancara serta dokumentasi diperoleh data bahwa Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial memiliki maksud dan tujuan dalam menyelenggarakan diklat pemantapan pendamping KUBE yaitu :

1) Maksud

Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pendamping tentang pendampingan sosial program penanggulangan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2) Tujuan Pelatihan

Setelah selesai mengikuti bimbingan pemantapan, peserta diharapkan dapat :

- a) Memahami kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam perspektif pemberdayaan sosial
- b) Memahami filosofi pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama
- c) Menjelaskan skema penyaluran bantuan KUBE
- d) Mengetahui kelembagaan KUBE
- e) Melaksanakan assessment dan penentuan UEP KUBE
- f) Memberikan motivasi pada anggota KUBE
- g) Memahami dan mampu mempraktekkan teknik pendampingan Kelompok Usaha Bersama.

c. Warga Belajar

Peserta Diklat Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE Perkotaan adalah calon pendamping KUBE perkotaan yang telah dinyatakan lulus seleksi dari Instansi Sosial Kab / Kota adapun peserta Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE berasal dari Kota Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan NTB.

d. Fasilitator dan Narasumber

Penyampaian materi bimbingan pemantapan pendamping KUBE disampaikan oleh fasilitator dari BBPPKS Yogyakarta, praktisi dan narasumber pusat maupun daerah. Fasilitator terdiri dari para widyaiswara dari BBPPKS Yogyakarta yang telah mengikuti dan lulus TOT Pendamping KUBE yang terdiri dari sebagai berikut :

No	Nama	Instansi
1	Bambang Tjahjono, M.Pd	BBPPKS Yogyakarta
2	Joko Sumarno, M.Si	BBPPKS Yogyakarta
3	Joko Wiweko, M.Pd	BBPPKS Yogyakarta
4	Uji Hartono, MA	BBPPKS Yogyakarta
5	Ngatijo	PKPEK Yogyakarta

Narasumber yang telah berpartisipasi menyampaikan materi pada kegiatan diklat ini adalah para pejabat struktural di lingkungan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan BBPPKS Yogyakarta.

e. Kurikulum

Kurikulum bimbingan pemantapan pendamping KUBE berjumlah 60 jam pelatihan @45 menit dengan perincian materi inti berjumlah 42 jam pelatihan, materi penunjang 12 jam pelatihan, dan lain-lain 6 jam pelatihan. Kurikulum diklat dibuat oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dengan memperhatikan kebutuhan peserta diklat di lapangan untuk proses pendampingan. Kurikulum diklat *terlampir*.

f. Pendekatan dan Metode

Bimbingan pemantapan pendamping KUBE ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang menekankan pada partisipasi aktif dan pemantapan pengalaman peserta. Adapun pendekatan yang mendasari pelaksanaan diklat ini adalah :

- 1) Partisipatif, yang memusatkan perhatian untuk membantu orang menemukan dan mengembangkan kemampuan menelaah, memilih, merencanakan, menciptakan, mengorganisasikan dan mengambil inisiatif. Prinsip partisipatif juga mengandung makna penciptaan suasana pelatihan menjadi menarik dan menyenangkan serta difokuskan untuk mengembangkan cara pandang, kemampuan, kepercayaan diri serta komitmen para peserta diklat.
- 2) Peserta merupakan subyek pelatihan sehingga pembelajaran merupakan ajang belajar bersama, namun tetap memberi ruang untuk proses belajar individual.
- 3) Nilai-nilai yang diinginkan dalam proses diklat adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Pendekatan ditunjang berbagai metode pembelajaran meliputi :

- 1) Ceramah dan tanya jawab

Fasilitator memberikan uraian tentang substansi-substansi pokok yang terkandung dalam setiap materi pelatihan. Peserta mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapatnya tentang topic. Fasilitator

memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan atau tanggapan peserta.

2) Bermain peran

Metode peragaan perilaku oleh fasilitator maupun peserta atas konsep, sikap maupun ketrampilan tertentu yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah permainan peran, fasilitator bersama peserta memberikan tanggapan dan evaluasi atas pelatihan peran tersebut. Kegiatan ini dapat dikelas maupun diluar kelas.

3) *Study kasus*

Peserta mendiskusikan suatu kasus. Kasus dapat diambil dari pengalaman peserta atau telah dipersiapkan sebelumnya oleh fasilitator. Studi kasus merupakan metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan dalam memecahkan masalah-masalah empiric dalam tugas kehidupannya.

4) *Brainstorming* (Curah Pendapat)

Untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan serta pengalaman peserta berkaitan dengan pokok bahasan materi pelatihan.

5) Fokus *Group Discussion* (diskusi kelompok)

Peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok, tiap kelompok mendiskusikan suatu materi atau kasus sesuai dengan pedoman diskusi/lembar kerja yang dipersiapkan. Fasilitator terlibat mendampingi peserta selama proses diskusi. Hasil diskusi dilaporkan

dalam suatu laporan yang disampaikan kelompok dalam diskusi pleno. Pada diskusi pleno tiap kelompok memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain, fasilitator memberikan tanggapan atas materi dan jalannya diskusi.

6) Penugasan

Peserta baik secara perorangan atau kelompok diberikan tugas-tugas yang harus dilakukan atau diselesaikan. Penugasan untuk melatih ketrampilan peserta untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah penugasan fasilitator dan peserta membahas bersama-sama hasil dan pengalaman dalam melaksanakan tugas tersebut.

7) Tayangan Video

Program tayangan video untuk membantu pemahaman dan ketrampilan peserta terhadap materi pelatihan, sekaligus sebagai modeling perilaku, gambaran tentang setting atau kondisi sosial. Program video dipersiapkan sebelumnya. Peserta memberikan tanggapan atau pertanyaan atas program video. Fasilitator bersama peserta memberikan penjelasan atau klarifikasi.

g. Pendanaan Program

Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE dibiayai dari Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan.

B. Data Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Diklat Pemantapan Pendamping KUBE

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan data bahwa pelaksanaan diklat pemantapan pendamping KUBE dilakukan melalui tiga tahapan yaitu perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, dan evaluasi diklat. Setelah pelaksanaan diklat, peserta dan anggota KUBE yang merupakan kelompok dampingan dari peserta diklat merasakan dampak diantaranya bertambah prestasi yang didapatkan dan pengetahuan pendamping semakin bertambah. Berikut uraian data hasil penelitian yang diperoleh :

a. Perencanaan Diklat

Program diklat pemantapan pendamping KUBE merupakan program dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Diklat ini dilaksanakan dengan tujuan agar pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat membantu anggota KUBE yang didampingi mengidentifikasi kebutuhan, mengelola bantuan, dan memecahkan masalah yang dihadapi anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara diklat diperoleh informasi bahwa perencanaan diklat meliputi kurikulum, metode, media belajar, dan sumber belajar telah disusun oleh pihak pusat yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kesejahteraan Sosial sehingga dari pihak BBPPKS Yogyakarta hanya menyiapkan jadwal harian dan jadwal

pelaksanaan, tempat, penentuan panitia dan narasumber / fasilitator. Hal ini disampaikan oleh Bapak “SD” selaku penyelenggara program, bahwa:

“perencanaan program diklat sepenuhnya dilaksanakan oleh pusat sedangkan dari kami sebelumnya melakukan rapat koordinasi untuk mengatur jadwal harian dan jadwal pelaksanaannya, tempat dan narasumber untuk peserta selain itu kami hanya menyiapkan panitia. Jadi ya bisa dikatakan kita terima perintah dari pusat bagaimana metode, materi, media dan sumber belajarnya..” (CW 1, 29 / 01 / 2015)

Persiapan Diklat selain yang dilakukan oleh bidang penyelenggara Diklat yang berada di BBPPKS juga dilakukan oleh widyaiswara. Widyaiswara memiliki peran dalam menyampaikan materi yang ada dalam kurikulum yang telah disusun. Persiapan yang dilakukan oleh widyaiswara diantaranya menyusun rancang bangun pembelajaran, rencana pembelajaran, bahan ajar, dan menyusun bahan tayang. Hal ini disampaikan oleh Bapak “UH” selaku widyaiswara, bahwa :

“sebelum diklat dilaksanakan kami para widyaiswara yang mendapat tugas dari pak kepala untuk mengisi materi juga mempersiapkan diantaranya kami melakukan rapat koordinasi dengan widyaiswara yang lain kemudian kami menyusun rancang bangun pembelajaran atau RPP, kemudian menyusun bahan ajar dan menyusun bahan tayang yang nantinya kita presentasikan saat diklat.” (CW 4, 18 / 02 / 2015)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE dilakukan oleh pihak Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kesejahteraan Sosial. Pihak penyelenggara Diklat di BBPPKS melakukan persiapan awal dengan kegiatan yang mencakup koordinasi, rapat dan konsultasi persiapan,

pemanggilan peserta dan penunjukkan panitia. Rapat koordinasi persiapan dilakukan untuk menentukan tujuan diklat bimbingan pemantapan, penjadwalan, tempat atau akomodasi, penentuan narasumber atau fasilitator dan panitia penyelenggara. Selain bidang penyelenggara diklat persiapan juga dilaksanakan oleh widyaiswara. Persiapan yang dilakukan yaitu dengan menyusun rancang bangun pembelajaran, menyusun bahan ajar dan bahan tayang.

b. Pelaksanaan Diklat

Pelaksanaan Diklat Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE dilaksanakan setelah semua perencanaan atau persiapan telah selesai dilakukan. Pelaksanaan Diklat meliputi kegiatan panitia (kesekretariatan), acara pembukaan, dinamika kelompok, sesi penyampaian materi, praktek belajar lapangan, dan pelaksanaan evaluasi. Hal ini disampaikan oleh penyelenggara diklat Bapak “SD” bahwa :

“setelah semua persiapan telah selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan diklat dimana pelaksanaan diklat melalui beberapa tahapan yaitu penerimaan peserta yang dilanjutkan dengan pengarahan program, acara pembukaan , dinamika kelompok, penyampaian materi, PBL, yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi.” (CW 1, 29 / 01 / 2015)

1) Tempat dan Waktu Pelaksanaan Diklat

Tempat dan waktu pelaksanaan diklat pemantapan pendamping KUBE berdasarkan surat tugas dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak “SD” bahwa :

“diklat KUBE dilaksanakan pada bulan september, pelaksanaannya berdasar perintah dari pusat. Kami sepakat melaksanakan di kantor BBPPKS Yogyakarta yang berada di veteran karena kebetulan waktu itu kantor purwomartani sedang dipakai untuk kegiatan yang lain” (CL 2, 29 / 01 2015)

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu “TH” sebagai salah satu peserta diklat bahwa :

“kemarin saya ikut diklat KUBE pas bulan September tempatnya di balai diklat yang kantornya di veteran, lumayan seneng sih mbak tempatnya deket dengan rumah Cuma nyebrang kebun binatang jadi saya bisa tiap malem pulang” (CW 2, 13 / 02 / 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada penyelenggara diklat dan peserta diklat maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan Diklat Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE pada tanggal 22 September sampai dengan 26 September 2014 yang bertempat di BBPPKS di kantor yang beralamat Jalan Veteran Yogyakarta.

2) Peserta Diklat

Peserta Diklat Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE merupakan calon pendamping KUBE yang mana telah dinyatakan lulus seleksi dari Instansi Sosial Kab / Kota yang menyelenggarakan program KUBE dan terdapat lowongan untuk formasi pendamping.

Hal ini disampaikan oleh Bapak “SD” bahwa:

“peserta diklat yang dipanggil adalah calon pendamping KUBE yang telah lolos seleksi di Dinsos Kabupaten atau Kota yang membutuhkan pendamping KUBE, dari data tersebut kami

penyelenggara di BBPPKS akan memanggil untuk diikutkan diklat” (CW 1, 29 / 01 / 2015)

Pada pelaksanaan Diklat periode September calon pendamping KUBE yang dipanggil untuk mengikuti Diklat berasal dari Kota Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan NTB. Hal ini ditegaskan oleh Ibu “TH” peserta diklat bahwa :

“peserta diklat berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan NTB. Kalo dari jogja cuman 3 orang aja sih dek” (CL 5, 13 / 02 / 2015)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peserta diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE merupakan calon pendamping KUBE yang telah lolos seleksi yang diadakan di Dinsos Kabupaten atau Kota setempat dimana peserta berdomisili. Peserta pelatihan berasal dari wilayah Kota Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan NTB.

3) Penerimaan Peserta

Penerimaan peserta dilaksanakan oleh panitia kesekretariatan dimana penerimaan peserta ini sekaligus pendaftaran ulang bagi peserta. Persyaratan yang harus diserahkan dalam registrasi ini telah tercantum dalam surat pemanggilan calon peserta. Hal ini disampaikan oleh Bapak “SD” selaku penyelenggara diklat bahwa :

“peserta yang telah diberi surat pemanggilan wajib datang pada hari pertama diklat untuk melakukan registrasi dengan menyerahkan surat tugas, surat dokter, SPPD, foto, fotokopi KTP, fotokopi buku tabungan. Semua persyaratan itu sudah

kami sampaikan dalam surat pemanggilan calon peserta diklat.” (CW 1, 29 / 01 / 2015)

Penerimaan peserta diklat Bimbingan Pemantapan KUBE yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2014 ini selain peserta menyerahkan persyaratan yang telah disampaikan di atas, peserta juga diminta mengisi data di laptop yang telah disediakan panitia, setelah selesai registrasi peserta berhak memperoleh kelengkapan diklat seperti *name tag*, tas, *block note*, pulpen, fotopi materi dan kaos. Hal ini disampaikan oleh Ibu “DN” sebagai peserta diklat bahwa :

“hari pertama diklat kami diminta untuk menyerahkan data seperti surat tugas, SPPD, foto, fotokopi ktp, dan fotokopi rekening tabungan. Setelah itu kami disuruh ngisi data dilaptop yang isinya nama lengkap, TTL, alamat rumah, nomer telepon, dan wilayah dampingan selepas ngisi data kami diberikan fasilitas diklat seperti dibagikan kamar yang akan ditempati selama diklat, tas, kaos, *block note* dan materi diklat.” (CL 8, 19 / 02 / 2015)

Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses penerimaan peserta yaitu pengisian *curriculum vitae*, pembagian kamar, serta pengecekan berkas yang mencakup surat tugas, SPPD, an tiket transportasi apabila peserta berasal dari luar pulau jogja. Kegiatan penerimaan peserta berlangsung selama 3-5 jam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari pertama pelaksanaan Diklat yaitu penerimaan peserta dimana peserta diminta menyerahkan persyaratan yang telah disampaikan dalam surat pemanggilan peserta diklat, registrasi juga dilaksanakan dengan

mengisi data diri peserta di laptop yang telah disediakan oleh panitia. Pada hari pertama diklat peserta juga diberi haknya berupa fasilitas seperti tas, buku, pulpen, kaos, dan materi diklat.

4) Pengarahan program dan Pra test

Pengarahan program merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peserta melaksanakan registrasi dimana kegiatan ini berupa penyampaian maksud dan tujuan pelaksanaan bimbingan pemantapan pendamping KUBE, hak dan kewajiban peserta, dan penyampaian tata tertib pelaksanaan diklat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada penyelenggara diklat pengarahan program dilaksanakan langsung oleh koordinator bimbingan pemantapan pendamping KUBE. Selain pengarahan program dilaksanakan juga pra tes yang mana bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak pemahaman peserta tentang KUBE. Hal ini disampaikan oleh Ibu “DN” peserta diklat bahwa :

“pada hari pertama jadwal kami lumayan padat setelah registrasi kami diberi waktu satu jam untuk istirahat lalu dilanjut dengan pengarahan program di aula sekaligus diadakan pra tes yang mana materinya tentang KUBE secara umum” (CW 5, 19 / 02 / 2015)

Hal ini diungkapkan juga oleh Bapak “SD” selaku penyelenggara diklat bahwa :

“ ya hari pertama itu koordinator diklat memberikan pengarahan tentang diklatnya seperti apa, jadwalnya bagaimana, dan kami sampaikan juga tentang tata tertib untuk peserta. Selain pengarahan diklat langsung diberikan juga pra tes ya untuk tahu

lah seberapa mengertinya peserta tentang KUBE” (CW 1, 29 / 01 / 2015)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan diklat terdapat pengarahan program dimana kegiatan ini berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan selama diklat berlangsung. Selain pengarahan program dilaksanakan pra tes yang berlangsung selama 40 menit. Evaluasi awal yang digunakan untuk mengerti bagaimana pemahaman peserta tentang materi KUBE.

5) Dinamika Kelompok

Pelaksanaan diklat selalu melibatkan peserta yang benar-benar baru dan belum mengenal satu sama lain. Dalam pelaksanaan diklat juga peserta masih awam sehingga bisa menyebabkan kebosanan nantinya, untuk mengatasi hal tersebut maka diadakan dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan kegiatan yang dilaksanakan di awal pelaksanaan diklat yang bertujuan untuk mengenal diri sendiri dan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, memiliki rasa kebersamaan serta kerjasama antar peserta. Hal ini diungkapkan oleh Bapak “UH” selaku widyaiswara bahwa :

“saat diklat berlangsung peserta akan mengikuti dinamika kelompok, dinamika kelompok dikemas melalui permainan-permainan dan kita buat menyenangkan. Melalui kegiatan ini kami ingin peserta saling mengenal baik dengan teman peserta lainnya dan dengan fasilitator” (CL 7, 18 / 02 / 2015)

Dinamika kelompok diawali dengan pengenalan fasilitator, senam peregangan, ice breaking, permainan, dan diakhiri dengan refleksi fasilitator, pembentukan pengurus kelas, pembuatan kontrak belajar yang menjadi kesepakatan bersama untuk menguatkan tata tertib yang telah ditetapkan oleh penyelenggara diklat, doa, dan pembentukan kelompok yang nantinya setiap pagi akan melaksanakan review. Hal ini disampaikan Ibu “TH” sebagai peserta diklat bahwa :

“kemarin hari pertama diklat juga diisi dinamika kelompok kegiatannya seneng-senang sih diisi dengan permainan, *ice breaking*, pengenalan antar peserta dan fasilitator, sama pembentukan pengurus kelas seperti ketua kelas dan sekretaris. Manfaatnya ya kita saling kenal antar peserta engga malu-malu lagi karena orangnya ternyata seru-seru” (CW 2, 13 / 02 / 2015)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok merupakan kegiatan awal sebelum diklat memasuki proses belajar mengajar. Dinamika kelompok merupakan kegiatan yang berfungsi untuk membuat peserta saling mengenal, memiliki rasa kebersamaan dan kerjasama, serta membentuk komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas baik sebagai individu, anggota kelompok atau lembaga dan masyarakat. Dinamika kelompok diisi dengan permainan-permainan yang mana bertujuan agar peserta tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan.

6) Pembukaan Diklat

Pembukaan diklat dilaksanakan pada hari kedua tepatnya tanggal 23 September 2014. Pembukaan diklat dilaksanakan oleh

kepala bidang penyelenggara diklat yang mana pembukaan diklat diisi dengan penyampaian sambutan yang kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta sebagai tanda dimulainya kegiatan bimbingan pemantapan. Hal ini disampaikan oleh Bapak “SD” bahwa :

“pembukaan diklat dilaksanakan pada hari kedua diklat yang dihadiri oleh pejabat struktural, widyaiswara, panitia, dan seluruh peserta diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE. Diisi dengan sambutan serta pengarahan singkat dari kepala bidang penyelenggara diklat dan dilanjut penyematan tanda peserta” (CL 2, 29 / 01 / 2015)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembukaan diklat dilaksanakan pada hari kedua diklat oleh kepala bidang penyelenggara diklat yang diisi dengan sambutan, pengarahan kepada peserta diklat agar mereka dapat menggunakan waktu selama diklat untuk sharing pengalaman serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan diklat sehingga nantinya dapat diaplikasikan dalam pendampingan KUBE di lapangan.

7) Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 25 September 2014. Penyampaian materi disampaikan oleh widyaiswara, narasumber pusat dan daerah serta praktisi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Setiap harinya diklat dimulai pada tanggal 07.30 dimana kegiatan diawali dengan review materi yang diterima sebelumnya. Hal ini disampaikan Bapak “UH” selaku widyaiswara bahwa :

“setiap harinya proses belajar dimulai pukul 07.30 diawali dengan review materi yang diterima sebelumnya. Review materi dilaksanakan per kelompok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan” (CW 4, 18 / 02 / 2015)

Terdapat beberapa komponen dalam proses pembelajaran diantaranya :

a) Materi

Proses pembelajaran dalam diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE berlangsung selama kurang lebih empat hari. Materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas meliputi : kebijakan penanggulangan kemiskinan, filosofi KUBE, skema penyaluran bantuan, *need assessment*, pengelolaan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pendampingan sosial, kepemimpinan masyarakat, pengendalian, kelembagaan, dan pengoorganisasian KUBE, serta pengembangan motivasi dan komitmen.

Materi yang disampaikan dalam diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE disesuaikan dengan kebutuhan peserta ketika peserta terjun untuk mendampingi KUBE di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak “UH” selaku widyaiswara bahwa :

“materi semua dibuat oleh pusdiklat dimana materinya disesuaikan dengan kebutuhan peserta untuk melakukan pendampingan nantinya. Materinya seputar tentang bagaimana mekanisme program dilaksanakan di lapangan” (CW 4, 18 / 02 / 2015)

Hal ini ditegaskan juga oleh peserta diklat Ibu “DN” bahwa :

“materi diklat seputar KUBE dan saya rasa sangat bermanfaat sekali, materinya disesuaikan dengan apa yang harus dilakukan pendamping. Saya yang pendamping baru dan harus belajar dari nol jadi terbuka wawasannya tentang KUBE” (CW 5, 19 / 02 / 2015)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan materi diklat bimbingan pematapan pendamping KUBE dibuat oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan para peserta diklat dalam melaksanakan pendampingan di masyarakat.

b) Media Pembelajaran

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, penggunaan media pembelajaran merupakan hal yang penting. Media pembelajaran berfungsi untuk mempermudah peserta memahami materi yang disampaikan dan mempermudah peserta dalam berinteraksi secara aktif dengan widyaiswara. Hal ini disampaikan Bapak “UH” selaku widyaiswara dalam diklat bahwa :

“setiap proses belajar pasti kami menggunakan media pembelajaran dimana media ini fungsi untuk membuat peserta mengerti apa yang kami sampaikan sehingga ada hubungan interaktif antara peserta dan widyaiswara” (CW 4, 18 / 02 / 2015)

Media yang digunakan dalam pelaksanaan diklat bimbingan pematapan pendamping KUBE diantaranya yaitu

Modul yang berisi materi diklat, Laptop, LCD, *flip chart* yang berisi tentang materi diklat, kertas plano yang digunakan peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi serta film atau video. Hal ini diungkapkan salah satu peserta diklat yaitu Ibu “DN” :

“untuk media pembelajaran cukup membantu kami dalam memahami materi yang disampaikan widyaiswara jadi kami tidak hanya mendengar tapi juga bisa baca. Media yang digunakan ada modul, laptop, LCD, *flip chart*, kertas plano, film juga” (CW 5, 19 / 02 / 2015)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE adalah modul berisi materi KUBE, laptop, LCD, *flip chart*, kertas plano, dan film atau video. Media yang digunakan berfungsi membantu peserta dalam memahami materi yang disampaikan oleh widyaiswara sehingga terjadi hubungan yang interaktif antara peserta dengan widyaiswara.

c) Widyaiswara

Widyaiswara dalam diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE merupakan widyaiswara dari BBPPKS Yogyakarta yang telah mengikuti dan lulus dalam *Training of trainer* (TOT) pendamping KUBE dan praktisi. Widyaiswara memiliki tugas memfasilitasi substansi pembelajaran sosial dengan kurikulum yang telah ditetapkan, baik pembelajaran klasikal yang diadakan di dalam kelas maupun non klasikal

seperti praktek belajar lapangan dan outbond. Dalam pelaksanaan diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE, widyaiswara dikatakan sudah memenuhi jumlah sehingga dalam setiap sesi pembelajaran widyaiswara dapat bergantian. Hal ini diungkapkan oleh penyelenggara diklat “Bapak SD” bahwa :

“widyaiswara untuk diklat KUBE dapat dikatakan sudah mencukupi jadi dalam setiap sesi bisa berubah-ubah widyaiswaranya ini menjadikan peserta tidak jemu” (CW 1, 29 / 01 / 2015)

Widyaiswara memiliki peran penting dalam pelaksanaan diklat, widyaiswara harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang menunjang dalam memfasilitasi suatu diklat. Kompetensi widyaiswara diantaranya :

- (1) Memahami dan mampu membimbing peserta agar memiliki komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab profesi.
- (2) Memahami dan membimbing peserta untuk menegakkan disiplin dan memiliki etos kerja
- (3) Memahami dan mampu menjelaskan tentang masalah sosial, pelayanan sosial, serta kebijakan kesejahteraan sosial
- (4) Memahami dan mampu menganalisis sumber-sumber pemenuhan kebutuhan / pemecahan masalah

(5) Memahami dan mampu memberikan bimbingan dan kerjasama peserta dalam kelompok

Kompetensi di atas sangat penting dimiliki oleh widyaiswara. Hal ini diungkapkan oleh Bapak “UH” salah satu widyaiswara bahwa :

“widyaiswara merupakan orang-orang yang sudah lulus TOT dan memiliki sertifikat untuk mengajar sebelum diklat dilaksanakan diadakan evaluasi besar di Jakarta dimana evaluasi bertujuan untuk perbaikan bagi kami dalam mengajar dan perbaikan materi yang akan disampaikan” (CW 4, 18 / 02 / 2015)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi widyaiswara dalam diklat memiliki beberapa kriteria yaitu sudah mengikuti TOT pendamping KUBE dan memiliki sertifikat telah lulus TOT. Untuk menjadi widyaiswara harus memiliki kompetensi widyaiswara hal ini penting dimiliki untuk menunjang proses pembelajaran.

d) Metode

Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) dimana metode ini menekankan partisipasi aktif dan pemanfaatan pengalaman peserta. Dalam metode *andragogy* seorang widyaiswara hanya sebatas memfasilitasi dan mendampingi proses belajar. Upaya yang dilakukan widyaiswara dalam menerapkan metode ini yaitu melibatkan

semua kelompok dalam pembelajaran dan mengemas materi melalui permainan dan study kasus. Hal ini diungkapkan widyaiswara dalam diklat bimbingan pemantapan KUBE yaitu Bapak “UH” bahwa :

“metode yang digunakan dalam diklat menggunakan metode *andragogy* dimana widyaiswara hanya memfasilitasi. Metode ini bertujuan membuat peserta lebih aktif dan partisipatif, dalam setiap pembelajaran kami mengemas materi melalui permainan dan kasus yang harus dipecahkan oleh peserta” (CL 7, 18 / 02 / 2015)

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada widyaiswara dan penyelenggara diklat ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran antara lain :

(1) Curah pendapat (*Brainstorming*) yaitu metode untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan serta pengalaman peserta berkaitan dengan pokok bahasan materi pelatihan

(2) Ceramah dan tanya jawab yaitu widyaiswara memberikan uraian tentang substansi-substansi pokok yang terkandung dalam setiap materi pelatihan kemudian peserta mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapat tentang topik. Fasilitator akan memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan atau tanggapan peserta.

(3) Permainan peran yaitu metode peragaan perilaku oleh fasilitator maupun peserta atas konsep, sikap maupun ketrampilan tertentu yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah permainan peran widyaiswara bersama peserta memberikan tanggapan dan evaluasi atas pelatihan peran tersebut.

(4) Diskusi kelompok dan pleno yaitu tiap kelompok mendiskusikan suatu materi atau kasus sesuai dengan pedoman diskusi atau lembar kerja yang telah dipersiapkan. Widyaiswara terlibat mendampingi peserta selama proses diskusi. Hasil diskusi dirumuskan dalam suatu laporan dan akan disampaikan dalam diskusi pleno. Pada diskusi pleno tiap kelompok memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Widyaiswara memberikan tanggapan atas materi dan jalannya diskusi.

(5) Studi kasus yaitu peserta mendiskusikan suatu kasus. Kasus diambil dari pengalaman peserta atau telah dipersiapkan sebelumnya oleh fasilitator. Studi kasus merupakan metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan dalam memecahkan masalah-masalah empirik dalam kehidupannya.

Dalam pelaksanaan diklat menurut salah satu peserta metode yang digunakan terlalu banyak materi sehingga banyak peserta yang merasa bosan jika materi yang disampaikan tidak dikemas secara menarik dan kreatif. Hal ini disampaikan Ibu “TH” bahwa :

“metodenya saya rasa kemarin banyak materinya jadi kami ya mendengarkan sambil ngantuk gitu tapi untungnya ada widyaiswara yang tanggap ketika peserta ngantuk langsung dikasih *ice breaking* atau nonton video” (CW 2, 13 / 02 / 2015)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam diklat yaitu metode pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) dimana pembelajaran menekankan pada partisipasi aktif dan pemanfaatan pengalaman peserta. Namun pada pelaksanaannya peserta merasa diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE terlalu banyak materi sehingga menyebabkan peserta mudah bosan.

8) Praktek Belajar Lapangan

Diklat yang dilaksanakan oleh BBPPKS Yogyakarta memiliki program yang dapat menunjang diklat yaitu praktek belajar lapangan (PBL). Praktek belajar lapangan merupakan tahapan akhir dimana peserta dituntut untuk mengimplementasikan materi yang sudah didapatkan sebelum ke lapangan. Hal ini disampaikan oleh Bapak “SD” bahwa :

“dalam setiap diklat ada PBL dimana didalam PBL peserta diajak melihat langsung keadaan KUBE di lapangan yang nantinya untuk acuan dalam pendampingan KUBE mereka ketika sudah kembali diklat “ (CW 1, 29 / 01 / 2015)

Praktek belajar lapangan (PBL) dalam diklat KUBE dilaksanakan dalam satu hari yang dilaksanakan di lembaga KUBE yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Praktek belajar lapangan diklat KUBE ini dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke KUBE, setelah kegiatan KUBE maka akan dilaksanakan review hasil PBL dengan widyaiswara. Hal ini diungkapkan oleh Bapak “UH” widyaiswara dalam diklat ini bahwa :

“PBL dilaksanakan selama satu hari, berbeda dengan diklat lainnya yang mana PBLnya bisa sampai 2 hari. Dalam PBL diklat bimbingan pemantapan KUBE ini hanya melakukan kunjungan ke KUBE yang ditentukan panitia setelah PBL selesai maka akan diadakan review bersama dan diadakan seminar untuk presentasi hasil PBL per kelompok” (CW 4, 18 / 02 / 2015)

Praktek belajar lapangan (PBL) dilaksanakan diantaranya di KUBE Kelurahan Kraton dan Kelurahan Rejowinangun Yogyakarta. Kelurahan yang dipilih ini merupakan wilayah yang dapat dikatakan sudah berprestasi dimana KUBE sudah memiliki prestasi memenangkan lomba di keasi produk serta sebagai percontohan KUBE-KUBE di kota Yogyakarta. Namun dalam pelaksanaan KUBE dirasakan kurang sesuai dengan harapan peserta yang ingin ada praktek pendampingan, peserta hanya diajak melakukan kunjungan ke KUBE untuk melihat bagaimana usaha yang dijalankan dan bagaimana

pendamping melaksanakan pendampingan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu “DN” salah satu peserta diklat bahwa :

“untuk PBL kemarin saya pribadi merasa kurang dapat prakteknya ya karena kemarin hanya diajak kunjungan ke KUBE dan tidak ada praktek apa saja yang harus dilakukan saat pendampingan jadi ya saya prakteknya langsung pas kerja di lapangan saja” (CW 5, 19 / 02 / 2015)

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktek belajar lapangan (PBL) dilaksanakan dengan tujuan peserta mengetahui KUBE yang ada di kota Yogyakarta yang diharapkan nantinya dapat menjadi bahan percontohan dalam melaksanakan pendampingan KUBE. Namun, dari ungkapan peserta PBL kurang sesuai dengan harapan mereka yang ingin ada praktek pendampingan, dalam PBL hanya dilaksanakan kunjungan saja. Setelah PBL dilaksanakan, diadakan review antara peserta bersama widyaiswara dimana metode review PBL melalui seminar per kelompok.

9) Penutupan Diklat

Pelaksanaan diklat yang telah berjalan selama lima hari tanggal 26 September 2014 secara resmi ditutup oleh kepala bidang penyelenggara diklat. Penutupan dilaksanakan setelah kegiatan *post test* dan evaluasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak “SD” bahwa :

“setelah lima hari pelaksanaan diklat maka diklat ditutup, penutupan ini dilaksanakan setelah kegiatan *post test* dan evaluasi” (CW 1, 29 / 02 / 2015)

Dalam penutupan diklat dilaporkan hasil pelaksanaan diklat, pelepasan tanda peserta, dan penyerahan sertifikat secara simbolis

kepada peserta yang memiliki nilai tertinggi dari hasil *post test*. Selain acara resmi penutupan, dilaksanakan juga penyelesaian administrasi oleh bagian keuangan meliputi uang transport dan uang harian. Hal ini diungkapkan oleh peserta diklat Ibu “TH” bahwa :

“kegiatan penutupan diisi dengan pelaporan hasil diklat oleh panitia kemudian ada pelepasan tanda peserta dan penyerahan sertifikat. Sebelum pulang kami juga diberi uang harian sebagai hak peserta dan uang transport namun kami yang dari kota jogja tidak dapat yang dapat hanya peserta dari luar jogja saja”
(CL 5)

Penutupan diklat merupakan kegiatan terakhir dalam pelaksanaan diklat dimana kegiatannya diisi dengan pelaporan hasil diklat oleh panitia, pelepasan dan penyerahan sertifikat kepada perwakilan peserta diklat serta pemberian hak peserta berupa uang transport dan uang harian.

c. Evaluasi Diklat

Evaluasi diklat dibagi menjadi tiga yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap fasilitator, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat. Evaluasi terhadap peserta *pra test* dan *post test*. *Pra test* bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta tentang diklat yang akan dilaksanakan, sedangkan *post test* dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan peserta setelah diklat untuk mengetahui kritik, saran, dan kekurangan yang dirasakan peserta selama diklat. Hal ini disampaikan oleh salah satu peserta diklat Ibu “TH” bahwa :

“evaluasi untuk peserta ada dua yaitu *pra test* dan *post test*. *Pra test* dilaksanakan pas awal sebelum diklat materinya tentang KUBE secara umum kalo *post test* dilaksanakan akhir diklat materinya tentang diklat yang dilaksanakan selain itu ada juga evaluasi untuk pelaksanaan diklat mulai dari prosesnya, sarprasnya sama widyaiswaranya” (CW 2, 13 / 02 / 2015)

Evaluasi terhadap widyaiswara bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan widyaiswara. Evaluasi widyaiswara dilaksanakan setelah widyaiswara selesai mengajar satu sesi. Informasi yang diperoleh dari peserta sangat penting karena akan dijadikan perbaikan diklat selanjutnya oleh widyaiswara. Komponen yang dievaluasi adalah :

- 1) Pencapaian tujuan pembelajaran
- 2) Sistematika penyajian
- 3) Kemampuan menyajikan / memfasilitasi sesuai program diklat
- 4) Ketepatan waktu dan kehadiran
- 5) Penggunaan metode dan sarana diklat
- 6) Sikap dan prilaku
- 7) Cara menjawab pertanyaan dari peserta
- 8) Penggunaan bahasa
- 9) Pemberian motivasi kepada peserta
- 10) Penguasaan materi
- 11) Kerapian berpakaian
- 12) Kerjasama antar widyaiswara, peserta, dan penyelenggara

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara diklat dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan pada widyaiswara diperoleh nilai

baik. Widyaiswara mampu menjelaskan materi dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan dari peserta secara baik namun terdapat nilai yang kurang dalam evaluasi tersebut antara lain dalam hal kemampuan menyajikan materi dan penggunaan metode banyak peserta yang memberikan saran penyampaian materi dilaksanakan lebih kreatif lagi agar peserta tidak cepat bosan. Hal ini disampaikan oleh Bapak “SD” selaku penyelenggara diklat bahwa :

“untuk evaluasi widyaiswara, hasilnya baik widyaiswara mampu menyampaikan materi dengan rinci, mampu memberikan motivasi pada peserta dan baik dalam menjawab pertanyaan peserta namun diakui peserta dalam memberikan materi widyaiswara kurang kreatif sehingga peserta cepat bosan” (CL 2, 29 / 02 / 2015)

Evaluasi selanjutnya dilaksanakan terhadap penyelenggaraan diklat. Evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat bertujuan untuk mengetahui persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat. Komponen dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat yaitu :

- 1) Bidang administratif meliputi waktu penyelenggaraan, kurikulum, jadwal pelatihan dan kesekretariatan
- 2) Bidang edukatif meliputi metode pembelajaran dan karakter *building*
- 3) Sarana dan prasarana meliputi ruang belajar, ruang asrama, perpustakaan dan konsumsi

Secara umum hasil evaluasi pada penyelenggaraan diklat mendapat nilai baik, namun pada bidang administratif terdapat banyak kekurangan dalam hal waktu penyelenggaraan dan sekretariatan. Menurut peserta

diklat dalam proses belajar materi terlalu lama sehingga menyebabkan peserta cepat bosan, peserta berharap waktu praktek lebih banyak. Sedangkan untuk kesekretariatan peserta merasa pelayanan pengetikan sulit diakses karena komputer terletak di dalam ruangan. Hal ini disampaikan oleh Ibu “DN” selaku peserta diklat bahwa :

“secara umum sih penyelenggaraan diklat baik tapi saya rasa diklat kemarin terlalu banyak materi sedangkan prakteknya sedikit kemudian dari segi fasilitas untuk layanan pengetikan tidak bisa diakses secara mudah peserta karena komputer ada didalam ruangan harusnya kan diletakkan di luar saja biar semua bisa mengakses cukup menghambat sih itu saya lihat” (CW 5, 19 / 02 / 2015)

Evaluasi diklat tidak berhenti pada evaluasi untuk peserta dan penyelenggara saja, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan diklat. Evaluasi dilaksanakan setelah enam bulan dari pelaksanaan diklat dimana penyelenggara diklat turun ke lapangan untuk melihat bagaimana hasil dampingan KUBE dari masing-masing peserta. Hal ini diungkapkan oleh Bapak “SD” bahwa :

“evaluasi dampak kami laksanakan setelah enam bulan pelaksanaan diklat, kami dari penyelenggara dan bidang evaluasi akan meninjau langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan KUBE dampingan peserta diklat” (CW 1, 29 / 01 / 2015)

Berdasar uraian di atas dapat diketahui bahwa evaluasi diklat dibedakan menjadi empat yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap widyaiswara, evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat dan evaluasi dampak. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kritikan, kekurangan, dan saran yang dapat dijadikan acuan perbaikan untuk pelaksanaan diklat selanjutnya. Selain itu evaluasi juga dilaksanakan untuk

mengetahui dampak bagi peserta maupun anggota dampingan yang mana evaluasi dilaksanakan setelah enam bulan pelaksanaan diklat. Secara umum pelaksanaan diklat bimbingan pemantapan KUBE berlangsung dengan baik walaupun ada kekurangan yang dirasakan peserta di bidang administratif.

2. Dampak Diklat Pemantapan Pendamping KUBE

Penyelenggaraan diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE merupakan suatu upaya untuk memenuhi kualitas dan kompetensi pendamping dalam penanggulangan kemiskinan. Secara khusus diklat ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pendamping tentang pendampingan sosial program penanggulangan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama.

Dampak yang dirasakan peserta dan anggota KUBE dari dampingan peserta diklat setelah mengikuti diklat pemantapan pendamping KUBE diantaranya :

a. Menambah wawasan dalam hal pengelolaan KUBE

Dampak yang terlihat dari diklat pemantapan KUBE adalah peserta mampu membentuk dan kelompok usaha bersama kemudian menentukan jenis usaha yang cocok untuk diterapkan dan dapat membantu dalam mengelola serta mengembangkan KUBE yang didampingi. Hal ini disampaikan oleh Bapak “UH” sebagai widyaiswara dalam diklat ini bahwa :

“setelah adanya diklat saya melihat peserta yang bekerja dilapangan mampu membentuk KUBE dan menentukan jenis

usaha untuk setiap KUBE yang didampingi” (CL 2, 29 / 02 / 2015)

Dalam pengelolaan suatu KUBE pendamping tidak selalu berjalan dengan lancar sering terjadi kendala dalam prosesnya seperti ketika anggota KUBE menghadapi masalah dalam usahanya, bingung memilih usaha yang cocok yang disesuaikan dengan modal yang dimiliki, dll. Setelah mengikuti diklat peserta merasa bertambah wawasan dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam KUBE. Hal ini disampaikan oleh Ibu “TH” salah satu peserta diklat bahwa :

“setelah diklat kami jadi semakin bertambah wawasan tentang KUBE sehingga ketika ada masalah kami dapat mengatasinya dengan cara *sharing* dengan anggota KUBE” (CL 5, 13 / 02 / 2015)

Hal ini ditegaskan juga oleh Ibu “DN” yang juga peserta diklat bimbingan pemantapan KUBE bahwa :

“dampak yang saya rasakan pribadi sih mungkin pengetahuan tentang KUBE menjadi bertambah, saya kan termasuk pendamping baru yang belajar KUBE dari nol kemudian dari segi ketrampilan juga insyaallah bermanfaat untuk dampingan saya” (CL 8, 19 / 02 / 2015)

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa setelah mengikuti diklat peserta menjadi bertambah wawasan untuk membantu mengelola KUBE mulai dari membentuk kelompok usaha, menentukan jenis usaha, dan membantu memecahkan masalah yang terjadi dalam KUBE dampingan.

b. Penambahan Relasi

Dampak diklat pemantapan pendamping KUBE yang selanjutnya yaitu penambahan relasi. Penambahan relasi tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah teman maupun *link* untuk melakukan *sharing* maupun diskusi terkait dengan permasalahan di KUBE maupun pemberian informasi kepada sesama peserta diklat.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu TH peserta diklat :

Setelah ikut diklat kami jadi punya banyak teman pendamping di berbagai wilayah Indonesia. Kami sering mengadakan diskusi, *sharing*, dan berbagi informasi tentang apapun melalui media sosial” (CL 5, 13 / 02 / 2015)

Hal ini ditegaskan juga oleh Ibu “DN” yang juga peserta diklat bimbingan pemantapan KUBE bahwa :

“yang pasti setelah diklat saya jadi punya banyak teman di berbagai daerah tidak hanya di jogja saja kami masih sering berhubungan untuk sekedar Tanya kabar atau diskusi via grup WA atau *facebook*” (CL 8, 19 / 02 / 2015)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dampak yang dirasakan peserta setelah mengikuti diklat adalah penambahan relasi yang mana dapat membantu peserta dalam melakukan *sharing* dan diskusi yang kaitannya dalam memajukan KUBE.

c. Adanya partisipasi aktif

Pelaksanaan diklat pemantapan pendamping KUBE berdampak pada partisipasi aktif baik dari pendamping maupun anggota KUBE. Salah satu anggota KUBE mengungkapkan setelah pelaksanaan diklat pendamping menjadi interaktif, disiplin, dan mampu memberikan

solusi dari masalah yang dihadapi anggota. Hal ini disampaikan Ibu “AN” yang merupakan anggota KUBE Kelurahan Rejowinangun bahwa :

“Ibu TH mendampinginya baik dan selalu hadir tiap ada pertemuan kelompok yang diadakan sebulan sekali. Kalo anggota ada kesulitan juga ibu TH selalu memberikan solusi kepada kami” (CW 3, 14 / 02 / 2015)

Setiap satu bulan sekali anggota KUBE harus melakukan perkumpulan dimana perkumpulan ini akan membahas masalah yang dihadapi anggota dan membahas kemajuan masing-masing usaha dari kelompok ini. Partisipasi dari anggota KUBE terlihat tinggi karena dari pendamping sendiri selalu mengingatkan pada anggotanya. Hal ini disampaikan oleh Ibu TH bahwa :

“bisa dikatakan partisipasi dari anggota KUBE tinggi karena setiap ada pertemuan selalu hadir malah saya yang sering diingatkan kalo ada pertemuan, awalnya memang susah tapi saya sering *ngoyak-oyak* ya alhamdulillah sekarang sudah sadar sendiri” (CL 5, 13 / 02 / 2015)

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan partisipasi aktif dari peserta diklat dan anggota KUBE. Hal ini penting dilakukan agar usaha yang mereka jalani menjadi maju dan apabila terdapat masalah dalam kelompok dapat diselesaikan bersama-sama dengan cara bermusyawarah.

d. Penambahan pendapatan ekonomi

Dampak pelaksanaan diklat yang dirasakan oleh anggota dampingan yaitu dari segi ekonomi. Setelah pendamping mengiuti

diklat dituntut untuk membuat usaha yang mana disesuaikan dengan kemampuan dari anggota, modal yang didapat, dan usaha yang dirasa dibutuhkan di masyarakat. Sasaran program KUBE yang merupakan masyarakat miskin sedikit demi sedikit mendapatkan penghasilan dan mampu menambah pendapatan ekonominya. Hal ini disampaikan oleh Ibu AN bahwa :

“sekarang alhamdulillah saya dan keluarga bisa menambah penghasilan dulu saya nganggur dan suami kerja serabutan setelah dapat bantuan KUBE kami membuat usaha took kayak gini ya saya bisa bantu-bantu suami lah” (CL 6, 14 / 02 / 2015)

Hal ini juga dirasakan oleh KUBE Kraton, KUBE yang merupakan dampingan dari Ibu “DN” yang berlokasi di Kelurahan Kraton telah memiliki banyak prestasi diantaranya menjadi percontohan KUBE di Yogyakarta, memenangkan lomba kreasi usaha KUBE berupa pengelolaan sampah dan ada pengembangan modal setiap tahunnya. Hal ini disampaikan oleh pendamping KUBE Kelurahan Kraton yang juga peserta diklat Ibu “DN” bahwa :

“kalo dampak dari segi prestasi yang bisa dilihat yaitu KUBE Kraton menjadi percontohan kemudian kami sering menang lomba kreasi dari usaha pengelolaan sampah yang kami jalankan dan setiap tahunnya alhamdulillah ada pengembangan modal” (CW 5, 19 / 02 / 2015)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh peserta KUBE maupun oleh anggota KUBE yang merupakan dampingan dari peserta diklat. dampak yang dirasakan yaitu pengetahuan dan ketrampilan peserta tentang

pengelolaan KUBE menjadi bertambah, peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki setelah diklat untuk proses pendampingan. Dampak selanjutnya yang dirasakan yaitu adanya partisipasi yang aktif antara peserta diklat maupun anggota dampingannya dan anggota KUBE menjadi bertambah pendapatan ekonominya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Diklat Pemantapan Pendamping KUBE

Program diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE merupakan kegiatan diklat yang diperuntukkan bagi calon pendamping KUBE yang memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung yang dirasakan oleh penyelenggara diklat yaitu adanya koordinasi yang baik dengan instansi-instansi yang terkait di provinsi kabupaten / kota. Hal ini yang dirasakan Bapak “SD” sebagai penyelenggara diklat bahwa :

“koordinasi yang baik dengan dinas di kabupaten / kota menjadi salah satu faktor pendukung yang kami rasakan dengan koordinasi yang baik akan memudahkan kami untuk mendapatkan data tentang calon peserta yang telah lolos seleksi dan siap mengikuti diklat”
(CW 1, 29 / 01 / 2015)

Faktor pendukung lain yang diketahui dari hasil wawancara yaitu sarana dan prasarana diklat yang disediakan oleh BBPPKS Yogyakarta sudah memadai. Hal ini diungkapkan oleh Ibu “TH” selaku sasaran program yang menyatakan bahwa:

“sarana prasarana dan fasilitas yang disediakan BBPPKS sudah lengkap dik ada laptop, LCD, flipchart, modul yang sangat membantu kami untuk memahami materi yang disampaikan. Ruang kelas dan kamarnya juga sudah enak ada AC” (CL 5, 13 / 02 / 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa faktor pendukung program diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE meliputi adanya koordinasi yang baik antara BBPPKS dengan instansi terkait di provinsi,kabupaten / kota dan faktor kedua yaitu sarana dan prasarana yang disediakan sudah memadai.

Faktor penghambat program diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE yang dirasakan oleh penyelenggara diklat yaitu walaupun sarana prasarana yang dimiliki sudah mendukung pelaksanaan diklat namun sarana prasarana yang dimiliki kurang modern. Hal ini disampaikan oleh Bapak “SD” selaku penyelenggara diklat bahwa :

“yang jadi faktor penghambat mungkin dari sarana prasarananya kurang modern missal LCD kadang tidak jelas kemudian *microphone* juga kurang bagus sering mendengung saya rasa ini membuat peserta jadi kurang nyaman. Namun itu semua tidak menjadi kendala yang berarti” (CL 2, 29 / 01 / 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka faktor penghambat program yaitu sarana prasarana yang dimiliki BBPPKS kurang modern missal di LCD yang gambarnya kurang bagus dan di *microphone* yang sering mendengung ketika digunakan.

C. Pembahasan

Pembahasan dari data penelitian yang peneliti dapatkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan Diklat Pemantapan Pendamping KUBE di BBPPKS Yogyakarta yaitu :

1. Penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping KUBE di BBPPKS Yogyakarta.

Pendidikan dan pelatihan menurut Mustofa Kamil (2010:10) adalah bagian dari proses belajar yang dilaksanakan di luar sistem sekolah, memerlukan waktu yang relatif singkat, dan lebih menekankan pada praktik. Sedangkan menurut Flippo (dalam Ikka Kartika, 2011) pendidikan dan pelatihan merupakan suatu usaha pengetahuan dan ketrampilan agar karyawan dapat mengerjakan suatu pekerjaan.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan memiliki beberapa tujuan seperti yang diungkapkan oleh Kemendagri (2013) yaitu :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi
- b. Memantapkan sikap dan semangat
- c. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir.

Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE ditujukan kepada calon pendamping KUBE yang telah dinyatakan lulus seleksi dari instansi sosial Kab / Kota. Adapun peserta berasal dari wilayah Kota

Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan NTB.

Tujuan dari pelaksanaan diklat bagi pendamping KUBE ini adalah :

- a. Memahami kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam perspektif pemberdayaan sosial
- b. Memahami filosofi pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama
- c. Menjelaskan skema penyaluran bantuan KUBE
- d. Mengetahui kelembagaan KUBE
- e. Melaksanakan *assessment* dan penentuan usaha ekonomi produktif KUBE
- f. Memberikan motivasi pada anggota KUBE
- g. Memahami dan mampu mempraktekkan teknik pendampingan KUBE. (BBPPKS, 2014)

BBPPKS sebagai penyelenggara diklat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta diklat di lapangan. Kurikulum yang terdapat dalam diklat antara lain : a) kebijakan penanggulangan kemiskinan, b) filosofi KUBE, c) kelembagaan dan pengorganisasian KUBE, d) *need assessment* penentuan UEP, e) skema bantuan stimulant, f) pengelolaan dan pengembangan UEP, g) pengendalian, h) pendampingan sosial, i) kepemimpinan masyarakat, j) kewirausahaan, k) motivasi dan pengembangan komitmen.

Berdasarkan kajian teori, pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan saja melainkan juga mengembangkan bakat. Menurut Mustofa Kamil (2010:11) ada tiga tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan dan pelatihan yaitu memenuhi kebutuhan organisasi, memperoleh pengertian dan pemahaman yang lengkap tentang pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta membantu para pemimpin organisasi dalam melaksanakan tugas. Berkaitan dengan kajian teori tersebut diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE sudah memberikan pengetahuan, ketrampilan dan motivasi pada peserta agar peserta nantinya mampu melaksanakan pendampingan langsung kepada masyarakat.

Pelaksanaan diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE melalui tiga tahapan yaitu perencanaan atau persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Roesmingsih (2009:46) perencanaan diklat meliputi : 1) menetapkan tujuan pelatihan, 2) menyusun strategi pelatihan, 3) menentukan metode, 4) menentukan materi, 5) membuat struktur dan prosedur dari diklat (*session plan*). Pelaksanaan pelatihan merupakan proses pembelajaran dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh fasilitator dengan peserta pelatihan. Menurut Mustofa Kamil (2010:159) komponen-komponen pelaksanaan diklat yaitu :

- 1) Materi pelatihan
- 2) Pendekatan, metode, dan teknik pelatihan
- 3) Pendanaan program pelatihan
- 4) Penilaian atau evaluasi

5) Hasil pelatihan

Menurut Sudjana (2008:7) evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana, dan / atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Perencanaan diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE yang dilaksanakan oleh BBPPKS meliputi persiapan awal dengan kegiatan yang mencakup koordinasi, rapat dan konsultasi persiapan, pemanggilan peserta dan penunjukan panitia. Rapat koordinasi persiapan dilakukan untuk menentukan tujuan diklat bimbingan pemantapan, penjadwalan, tempat atau akomodasi, penentuan narasumber atau fasilitator dan panitia penyelenggara. Selain bidang penyelenggara diklat persiapan juga dilaksanakan oleh widyaiswara. Persiapan yang dilakukan yaitu dengan menyusun rancang bangun pembelajaran, menyusun bahan ajar dan bahan tayang atau PPT yang akan disampaikan pada proses belajar mengajar.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Penentuan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan surat tugas dari pusat yaitu Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksanaan diklat hal-hal yang harus diperhatikan yaitu materi, metode, media, dan widyaiswara. Berdasarkan hasil penelitian materi yang diberikan dalam diklat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk peserta sebagai pendamping KUBE. Metode yang digunakan dalam

diklat menggunakan metode pembelajaran orang dewasa dimana pembelajaran menekankan partisipasi aktif dari peserta dan memanfaatkan pengalaman peserta. Media yang digunakan dalam diklat ini berupa modul yang berisi materi, laptop, LCD, *flip chart*, serta film atau video. Widyaiswara yang bertugas merupakan pihak yang telah berpengalaman dalam bidang KUBE, widyaiswara yang mengisi materi dalam pelaksanaan diklat adalah widyaiswara yang telah lulus dan memiliki sertifikat TOT pendampingan KUBE.

Menurut Anwar Rosyid (2014) Diklat dikatakan ideal bila 20 % dilakukan didalam kelas atau teori, dan 80 % diluar kelas atau praktek. Dalam pelaksanaan Diklat pemantapan pendamping KUBE dapat dikatakan kurang ideal karena masih terlalu banyak teori daripada praktek. Praktek belajar lapangan hanya digunakan untuk kunjungan ke KUBE yang telah dipilih oleh pihak BBPPKS.

Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi diklat dibedakan menjadi tiga yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap widyaiswara, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat. Secara umum pelaksanaan diklat bimbingan pemantapan KUBE berlangsung dengan baik walaupun ada kekurangan yang dirasakan peserta di bidang administratif. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kritik peserta atas penyelenggaraan diklat. Hasil evaluasi yang telah dikumpulkan dapat dijadikan bahan perbaikan bagi pelaksanaan diklat selanjutnya.

Berdasarkan kajian teori, dalam pelaksanaan diklat terdapat berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain sehingga terjadi proses pembelajaran. Unsur-unsur pembelajaran dalam diklat menurut Ikka Kartika A. Fauzi (2011:20) yaitu peserta pelatihan, narasumber / fasilitator, penyelenggara, kurikulum, media, metode, sarana prasarana, proses pelatihan, dan dampak pelatihan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti unsur-unsur yang dijelaskan dalam teori tersebut sudah terpenuhi dalam pelaksanaan diklat pemantapan pendamping KUBE.

Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE yang dilaksanakan BBPPKS Yogyakarta, proses dalam memberikan materi sudah sesuai dengan kebutuhan peserta. Peserta yang merupakan calon pendamping KUBE dapat memahami bagaimana mengelola KUBE dan bagaimana cara pendampingan di lapangan. Metode dan strategi yang digunakan disesuaikan dengan pembelajaran luar sekolah dimana menggunakan metode orang dewasa sehingga peserta dapat lebih aktif dan widyaiswara tidak terus menerus menyampaikan materi. Strategi pembelajaran orang dewasa ini mampu menunjukkan kebermanfaatan materi baik pengetahuan dan ketrampilan yang dipelajari oleh peserta diklat sehingga peserta mengetahui pentingnya mempelajari materi tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan pelaksanaan diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE sudah tergolong baik walaupun ada beberapa kekurangan yang terjadi, peserta merasa mendapatkan ilmu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pendampingan KUBE dan

dapat memberikan motivasi kepada anggota KUBE yang ada dalam wilayah dampingannya.

Keberhasilan penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping KUBE tersebut karena terdapat dukungan positif dari berbagai instansi-instansi di provinsi maupun kabupaten atau kota. Dukungan keberhasilan program juga didapatkan dari motivasi yang tinggi dari peserta diklat dan sarana prasarana pembelajaran yang sudah memadai. Namun, selain dari dukungan tersebut juga terdapat faktor penghambat yang membuat tujuan tidak tercapai secara optimal.

Faktor penghambat yang dirasakan oleh penyelenggara program diklat yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki kurang modern, dalam pelaksanaan proses pembelajaran peserta mudah merasa bosan karena kurang beragamnya cara widyaiswara dalam menyampaikan materi, dan kurangnya praktek dalam pelaksanaan diklat yang dirasa kurang.

Kesimpulan yang dapat diketahui dari hasil pembahasan mengenai penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping KUBE yaitu penyelenggara diklat sudah sesuai dengan tujuan dilaksanakannya diklat pemantapan pendamping KUBE. Artinya penyelenggaraan diklat sudah memberikan bekal pengetahuan, keahlian dan ketrampilan tentang KUBE kepada peserta diklat yang nantinya akan langsung terjun mendampingi kelompok-kelompok usaha di lapangan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala seperti materi praktek dirasa kurang sehingga

pihak penyelenggara harus mampu mengatasi permasalahan ini dengan menambah materi praktek dalam diklat selanjutnya.

2. Dampak Pelaksanaan Diklat Pemantapan Pendamping KUBE di BBPPKS Yogyakarta

Kebutuhan akan peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi pada masa sekarang semakin dirasakan seiring dengan semakin meluas dan semakin rasionalnya hubungan-hubungan manusia dalam tatanan global masyarakat modern. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penguasaan ilmu dan teknologi.

Sebuah KUBE perlu mendapatkan pendampingan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi, mengembangkan usaha KUBE serta mengakses pasar dan pemodalan. Menurut Arif Setyo Utomo (2014) peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama yaitu fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampingi :

- 1) Fasilitator. Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat.
- 2) Pendidik. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.
- 3) Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya.
- 4) Peran-peran teknis. Mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis, pendamping dituntut untuk melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Menurut Aulia (2013:13), suatu program yang telah dilaksanakan akan memberikan hasil dan dampak yang beragam bagi seseorang atau kelompok, khususnya program-program yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat menjadi target utama dalam menentukan keberlanjutan program kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, perlunya diketahui dampak dari penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping KUBE terhadap sasaran atau peserta diklat. Menurut KBBI (2005:234), dampak berarti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif ataupun positif). Dampak merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh perilaku atau tindakan dari atau ditujukan bagi individu maupun kelompok.

Dampak menurut Ikka Kartika A. Fauzi (2011:23) menyangkut hasil yang dicapai oleh peserta pelatihan dan lulusan. Pengaruh meliputi perubahan taraf hidup, kegiatan membelajarkan orang lain atau mengikutsertakan orang lain dalam memanfaatkan hasil belajar yang dimiliki dan peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial.

Dampak diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas dan kompetensi peserta diklat dalam bidang kelembagaan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE yang dilaksanakan oleh BBPPKS Yogyakarta maka dapat diketahui bahwa berdampak positif bagi peserta diklat yang merupakan calon pendamping KUBE.

Secara umum dampak yang dirasakan oleh peserta KUBE maupun oleh anggota KUBE yang merupakan dampingan dari peserta diklat. Dampak yang dirasakan yaitu pengetahuan dan ketrampilan peserta tentang pengelolaan KUBE menjadi bertambah, peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki setelah diklat untuk proses pendampingan. Dampak selanjutnya yang dirasakan yaitu adanya partisipasi yang aktif antara peserta diklat maupun anggota dampingannya dan anggota KUBE menjadi bertambah pendapatannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan pemantapan pendamping KUBE di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping KUBE melalui tiga tahapan yaitu perencanaan atau persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE meliputi persiapan awal dengan kegiatan yang mencakup koordinasi, rapat dan konsultasi persiapan, pemanggilan peserta dan penunjukan panitia. Tahap pelaksanaan yaitu tahapan dimana dilaksanakannya proses pembelajaran. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi diklat dibedakan menjadi tiga yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap widyaiswara, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat.
2. Penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping KUBE tergolong baik walaupun terdapat beberapa kekurangan, peserta merasa mendapatkan ilmu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pendampingan KUBE dan dapat memberikan motivasi kepada anggota KUBE yang ada dalam wilayah dampingannya.

3. Dampak yang dirasakan setelah adanya pelaksanaan diklat pemantapan pendamping KUBE yaitu pengetahuan dan ketrampilan peserta tentang pengelolaan KUBE menjadi bertambah, peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki setelah diklat untuk proses pendampingan, adanya partisipasi yang aktif antara peserta diklat maupun anggota dampungannya dan anggota KUBE menjadi bertambah pendapatannya ekonominya.
4. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan diklat pemantapan pendamping KUBE yaitu :
 - a. Faktor pendukung :
 - 1) Adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi di provinsi maupun kabupaten / kota
 - 2) Motivasi yang tinggi dari peserta diklat
 - 3) Sarana prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran sudah memadai
 - b. Faktor penghambat :
 - 1) Sarana prasarana yang tersedia kurang modern
 - 2) Dalam pelaksanaan proses belajar peserta mudah merasa bosan
 - 3) Praktik dalam pelaksanaan diklat dirasa kurang

B. Saran

1. Proses pembelajaran diklat sebaiknya benar-benar memenuhi apa yang sudah direncanakan yaitu 80 % untuk praktik dan 20 % untuk materi agar

peserta pelatihan nantinya lebih mempunyai ketrampilan dalam melakukan pendampingan di masyarakat.

2. Perlu adanya pembaharuan sarana prasarana agar tidak mengganggu proses pembelajaran.
3. Fasilitator hendaknya memberikan materi dengan diselingi *icebreaking* agar peserta tidak mudah bosan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ambar Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Arif Setyo Utomo. (2014). *Peran Pendamping Dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Lokal KUBE*. Diunduh dari ugm.ac.id pada tanggal 15 Maret 2015 jam 18.30 WIB
- A.Umara. (2006). *Praktek Manajemen SDM : Unggul Melalui Orientasi dan Pelatihan Karyawan*. Yogyakarta : Santusta.
- Departemen Sosial RI. (2005). *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2006-2010*, Jakarta : Departemen Sosial RI.
- Desy Fatmawati. (2012). *Perencanaan Mata Diklat* (online). Diunduh dari www.academia.edu pada tanggal 22 April 2015 jam 19.00 WIB
- Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin. (2010). *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta : Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. (2011). *Profil KUBE dan Pendamping Berprestasi di 24 Provinsi*. Jakarta : Kementerian Sosial RI
- Djudju Sudjana. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Dwi Siswoyo, dkk. (2007). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Edi Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Edi Suharto. (2013). *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung : Alfabeta

- Gouzali Saydam. (2006). *Built In Training Jurus Jitu Mengembangkan Profesionalisme SDM*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Haryati R. *Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama*. Diunduh dari puslit.kemsos.go.id pada tanggal 15 Maret 2015
- H.M Saleh Marzuki. (2012). *Pendidikan Nonformal Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ikka Kartika A. Fauzi. (2011). *Mengelola Pelatihan Partisipatif*. Bandung : Alfabeta
- Kusnadi. (2005). *Pendidikan Keaksaraan Filosofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
- Marihot AMH Manullang. (2006). *Manajemen Personalia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Mel Silberman. (2013). *Active Training*, Bandung : Nusa Media
- Muh. Afroji. (2012). *Sistem Diklat dan Peran Penyelenggara Diklat* (online). Diunduh dari [www. academia. edu](http://www.academia.edu) pada tanggal 22 April 2015 jam 19.00 WIB
- Mustofa Kamil. (2010). *Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung : Alfabeta.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. (2007). *Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta : Pusdiklat Kesejahteraan Sosial.
- RB. Khatib Pahlawan Kayo. (2008). *KUBE Sebagai Wahana Intervensi Komunitas Dalam Praktek Pekerjaan Sosial*. Padang : BBPPKS Padang
- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Roesminingsih, Erny. (2009). *Pedoman Model dan Paket Pelatihan Peningkatan Mutu Guru dalam Prespektif Manajemen Strategik* (online). Diakses di www.slideshare.net pada tanggal 22 April 2015 pada jam 20.00 WIB

Sri Umiatun Andayani. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama*. Diunduh dari journal. Unisfat. ac.id pada tanggal 7 November 2014 jam 20.00 WIB

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

Suradi, Mujiyadi. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Jakarta : P3KS Press.

Susilo. (2003). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Kediri* (online). Diakses dari portalgaruda.org pada tanggal 14 Maret 2015 jam 16.00 WIB

www. Bps.go.id diakses pada tanggal 8 November 2014 jam 07.00 WIB

_____. (2012). *Pelatihan dan Pengembangan* [online]. Diakses di <http://anahuraki.lecture.ub.ac.id/files/2012/04/7.pelatihan-dan-pengembangan.pdf> diambil pada tanggal 15 Desember 2014 jam 07.00 WIB

_____. (2014). *Pengertian dan Unsur-Unsur Pendidikan* [online]. Diakses di <http://www.academia.edu> pada tanggal 30 Maret 2015 jam 06.00 WIB

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara Untuk Bidang Penyelenggara Diklat Di BBPPKS Yogyakarta

A. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/ Perempuan)
2. Jabatan :
3. Usia :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
7. Pendidikan Terakhir :

B. Fasilitas

1. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBPPKS Yogyakarta?
2. Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki?
3. Bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki?
4. Apakah sarana dan prasarana tersebut mampu mendukung kegiatan Diklat di BBPPKS Yogyakarta?
5. Darimana saja jejaring dari BBPPKS Yogyakarta?
6. Dalam hal apa pihak jejaring bekerjasama dalam membantu pelaksanaan Diklat di BBPPKS Yogyakarta?

C. Pengembangan SDM

1. Berapa jumlah pegawai di BBPPKS Yogyakarta?
2. Bagaimana cara rekrutmen pegawai?
3. Apa saja kriteria yang digunakan untuk perekrutan pegawai?
4. Apa saja prestasi yang dimiliki oleh pegawai BBPPKS Yogyakarta sampai saat ini?

D. Pendanaan

1. Darimana sumber pendanaan di BBPPKS Yogyakarta?
2. Apakah ada pihak lain yang bekerjasama dalam membantu pendanaan di BBPPKS Yogyakarta?

3. Bagaimana pengelolaan dana tersebut?
4. Bagaimana pemanfaatan dana tersebut?

E. Pelaksanaan Diklat

1. Apa saja proses perencanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
2. Bagaimana proses perekrutan peserta diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
3. Apa saja kriteria perekrutan peserta Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
4. Bagaimana penentuan fasilitator Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
5. Apa saja kriteria fasilitator Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
6. Bagaimana proses pelaksanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
7. Bagaimana perumusan kurikulum Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
8. Apa saja media pembelajaran yang digunakan?
9. Bagaimana metode pembelajaran diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
10. Apa sumber belajar yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat?
11. Bagaimana proses evaluasi Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
12. Komponen-komponen apa saja yang di evaluasi?
13. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
14. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
15. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan tersebut?

F. Dampak Pelaksanaan Diklat :

1. Bagaimana pengelolaan KUBE setelah pendamping mengikuti diklat?
2. Adakah pengembangan KUBE setelah pendamping mengikuti diklat?
3. Apa saja bentuk pengembangannya?
4. Apa saja prestasi yang didapatkan oleh KUBE setelah pendamping mengikuti diklat?

Pedoman Wawancara
Untuk Widyaiswara Diklat Bagi Pendamping KUBE
Di BBPPKS Yogyakarta

A. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/ Perempuan)
2. Jabatan :
3. Usia :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
7. Pendidikan Terakhir :

B. Pelaksanaan Diklat

1. Apa saja proses perencanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
2. Bagaimana proses perekrutan peserta diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
3. Apa saja kriteria perekrutan peserta Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
4. Bagaimana penentuan widyaiswara Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
5. Apa saja kriteria widyaiswara Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
6. Bagaimana proses pelaksanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
7. Bagaimana perumusan kurikulum Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
8. Apa saja media pembelajaran yang digunakan?
9. Bagaimana metode pembelajaran diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
10. Apa sumber belajar yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat?
11. Bagaimana proses evaluasi Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
12. Komponen-komponen apa saja yang di evaluasi?
13. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
14. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
15. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan tersebut?

Pedoman Wawancara
Untuk Peserta Diklat Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE
Di BBPPKS Yogyakarta

A. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/ Perempuan)
2. Jabatan :
3. Usia :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
7. Pendidikan Terakhir :

B. Pelaksanaan Diklat

1. Apa saja proses perencanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
2. Bagaimana proses perekrutan peserta diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
3. Apa saja kriteria perekrutan peserta Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
4. Bagaimana penentuan fasilitator Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
5. Apa saja kriteria fasilitator Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
6. Bagaimana proses pelaksanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
7. Bagaimana perumusan kurikulum Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
8. Apa saja media pembelajaran yang digunakan?
9. Bagaimana metode pembelajaran diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
10. Apa sumber belajar yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat?
11. Bagaimana proses evaluasi Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
12. Komponen-komponen apa saja yang di evaluasi?
13. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
14. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE?
15. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan tersebut?

C. Dampak Pelaksanaan Diklat :

1. Bagaimana pengelolaan KUBE setelah pendamping mengikuti diklat?
2. Adakah pengembangan KUBE setelah pendamping mengikuti diklat?
3. Apa saja bentuk pengembangannya?
4. Apa saja prestasi yang didapatkan oleh KUBE setelah pendamping mengikuti diklat?

Pedoman Wawancara
Untuk Anggota KUBE
Di Kelurahan Rejowinangun, Yogyakarta

A. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/ Perempuan)
2. Jabatan :
3. Usia :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
7. Pendidikan Terakhir :

B. Dampak Pelaksanaan Diklat :

1. Bagaimana pengelolaan KUBE setelah pendamping mengikuti diklat?
2. Adakah pengembangan KUBE setelah pendamping mengikuti diklat?
3. Apa saja bentuk pengembangannya?
4. Apa saja prestasi yang didapatkan oleh KUBE setelah pendamping mengikuti diklat?

Pedoman Observasi
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendamping KUBE
Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

No	Aspek	Deskripsi
1	Identifikasi lembaga BBPPKS Yogyakarta : a. Letak geografis b. Sejarah Berdiri c. Tujuan, Visi, Misi d. Struktur Organisasi e. Program-program	
2	Fasilitas : a. Sarana dan Prasarana b. Jejaring c. Pengelolaan d. Pemanfaatannya	
3	Pengembangan SDM : a. Rekrutmen b. Kriteria c. Prestasi	
4	Pendanaan : a. Sumber b. Pengelolaan c. Pemanfaatan	
5	Pelaksanaan Diklat: a. Perencanaan b. Langkah-langkah pelaksanaan c. Evaluasi	
6	Dampak Pelaksanaan Diklat : a. Pengelolaan KUBE b. Pengembangan KUBE c. Prestasi	

Pedoman Dokumentasi
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE
Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

A. Di BBPPKS Yogyakarta Melalui Arsip Tertulis

1. Sejarah berdirinya BBPPKS Yogyakarta
2. Visi , Misi dan Tujuan
3. Data pegawai di BBPPKS Yogyakarta
4. Struktur Organisasi BBPPKS Yogyakarta

B. Foto

1. Gedung BBPPKS Yogyakarta
2. Fasilitas, sarana dan prasarana BBPPKS Yogyakarta
3. Pelaksanaan Diklat

LAMPIRAN 2. CATATAN LAPANGAN

CATATAN LAPANGAN

Observasi : 1

Hari, Tanggal : Senin, 24 November 2014

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
(BBPPKS) Yogyakarta

Kegiatan : Observasi Awal dan Studi Pendahuluan

Deskripsi :

Peneliti datang ke BBPPKS pukul 09.00 dan menemui Ibu “SY” selaku Kepala Bidang Diklat BBPPKS Yogyakarta. Peneliti menanyakan beberapa program Diklat yang sedang berlangsung dan menanyakan beberapa hal tentang Diklat KUBE yang mana merupakan fokus penelitian yang akan diambil oleh peneliti.

Setelah studi pendahuluan dirasa cukup, peneliti mohon pamit dan menyampaikan izin bahwa beberapa waktu ke depan akan segera melaksanakan kegiatan penelitiannya.

CATATAN LAPANGAN

Observasi : 2

Hari, Tanggal : Senin, 29 Januari 2015

Waktu : 09.30 – 11.30 WIB

Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
(BBPPKS) Yogyakarta

Kegiatan : Wawancara tentang pelaksanaan Diklat KUBE

Deskripsi :

Peneliti datang ke BBPPKS Yogyakarta pukul 09.30 untuk bertemu dengan kepala bidang penyelenggara Diklat. Kepala bidang penyelenggara diklat yaitu ibu “SY” memberikan arahan untuk langsung menemui Bapak “SD” selaku kepala diklat TKSM (Tenaga Kerja Sosial Masyarakat) untuk mencari informasi tentang diklat KUBE karena beliau selaku penanggung jawab diklat tersebut.

Peneliti langsung melakukan wawancara terkait bagaimana pelaksanaan Diklat KUBE kepada Bapak “SD”. Beliau menjawab pertanyaan dengan menjelaskan secara rinci dan baik. Selain menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti beliau juga memberikan laporan Diklat yang mana dapat dijadikan tambahan dan acuan peneliti untuk mempelajari Diklat lebih mendalam.

Setelah dirasa cukup, peneliti mohon pamit kepada bapak “SD” dan mengutarakan niat bahwa hari selanjutnya akan melakukan wawancara kepada Widyaiswara, bapak “SD” pun memberikan rekomendasi widyaiswara yang dapat memberikan informasi dan membantu peneliti dalam menggali informasi.

CATATAN LAPANGAN

Observasi : 3

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Februari 2015

Waktu : 09.30 – 10.30 WIB

Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
(BBPPKS) Yogyakarta

Kegiatan : Menghadap Kepala BBPPKS Yogyakarta

Deskripsi :

Peneliti datang ke BBPPKS Yogyakarta untuk menghadap Bapak “NP” selaku Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. Bapak “NP” meminta peneliti datang untuk mengutarakan bagaimana skema pelaksanaan penelitian dan menanyakan siapa saja yang akan menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini.

Peneliti mengutarakan maksud dan tujuan penelitian kepada Bapak “NP” dan memohon izin untuk diperbolehkan melaksanakan penelitian di BBPPKS Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut Bapak “NP” juga menjelaskan bagaimana prosedur melaksanakan penelitian dan beliau sangat mendukung pelaksanaan penelitian tersebut serta berharap hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbaikan bagi penyelenggaraan diklat.

Setelah dirasa cukup, peneliti mohon pamit dan mengucapkan terimakasih atas izin yang diberikan oleh pihak BBPPKS Yogyakarta.

CATATAN LAPANGAN

Observasi : 4

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Februari 2015

Waktu : 08.30 – 09.30 WIB

Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
(BBPPKS) Yogyakarta

Kegiatan : Mencari Data Peserta Diklat KUBE

Deskripsi :

Peneliti datang ke BBPPKS pukul 08.30 untuk menghadap Bapak “SD”. Peneliti datang menemui Bapak “SD” dengan keperluan untuk meminta data peserta diklat KUBE yang sekiranya dapat ditemui dan terjangkau oleh peneliti. Setelah mencari rekapan data peserta diklat, Bapak “SD” memberikan saran untuk menemui peserta diklat yang juga merupakan pendamping KUBE wilayah kota Yogyakarta yaitu Ibu “TH” dan Ibu “DN”. Setelah dirasa cukup, peneliti mohon pamit dan mengucapkan terimakasih atas informasi yang didapatkan.

Peneliti langsung melakukan wawancara bagaimana pelaksanaan diklat yang pernah diikuti, bagaimana hasil dari diklat tersebut bagi peserta serta apa dampak yang dirasakan setelah mengikuti diklat.

CATATAN LAPANGAN

Observasi : 5
Hari, Tanggal : Jumat, 13 Februari 2015
Waktu : 13.00 – 13.45 WIB
Tempat : Gedongkuning Yogyakarta
Kegiatan : Wawancara kepada Peserta Diklat KUBE
Deskripsi :

Peneliti datang menemui Ibu “TH” di rumahnya yang berada di Gedongkuning Yogyakarta. Sebelumnya peneliti telah membuat janji kepada Ibu “TH”. Ibu “TH” merupakan salah satu peserta Diklat bagi Pendamping KUBE yang berasal dari kota Yogyakarta, beliau saat ini juga merupakan pendamping KUBE di kelurahan Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta. Selain menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, beliau juga memperlihatkan laporan pendampingan KUBE yang mana dapat dijadikan tambahan dan acuan peneliti untuk mempelajari KUBE lebih mendalam.

Setelah dirasa cukup peneliti mohon pamit kepada Ibu “TH” dan mengutarakan niat untuk melakukan wawancara kepada anggota KUBE dampingan Ibu “TH”, beliau pun memberikan rekomendasi untuk menemui Ibu “AN” yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kediaman Ibu “TH”.

CATATAN LAPANGAN

Observasi : 6

Hari, Tanggal : Sabtu, 14 Februari 2015

Waktu : 10.00 – 10.30 WIB

Tempat : Gedongkuning Yogyakarta

Kegiatan : Wawancara kepada Anggota KUBE

Deskripsi :

Peneliti datang menemui Ibu “AN” yang merupakan anggota KUBE yang didampingi oleh Ibu “TH”. Peneliti melakukan wawancara bagaimana manfaat dari adanya pendampingan KUBE yang dilakukan oleh Ibu “TH” kemudian menanyakan bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh Ibu “TH”, bagaimana langkah yang dilakukan pendamping saat anggota menghadapi masalah. Setelah informasi dirasa cukup peneliti mohon pamit dan menyampaikan terimakasih.

CATATAN LAPANGAN

Observasi : 7

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Februari 2015

Waktu : 07.30 – 09.45 WIB

Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
(BBPPKS) Yogyakarta

Kegiatan : Wawancara kepada widyaiswara

Deskripsi :

Peneliti datang ke BBPPKS setelah sebelumnya mengadakan janji untuk Bapak “UH”. Bapak “UH” merupakan salah satu widyaiswara pada diklat bimbingan pemantapan KUBE. untuk mencari informasi proses pelaksanaan diklat tersebut.

Peneliti langsung melakukan wawancara terkait bagaimana pelaksanaan Diklat kepada Bapak “UH” terkait materi, metode, bahan ajar, media belajar, maupun hal-hal yang disiapkan dalam pelaksanaan diklat. Beliau menjawab pertanyaan dengan menjelaskan secara rinci dan baik. Setelah dirasa cukup, peneliti mohon pamit kepada bapak “UH” dan mengucapkan terimakasih atas bantuan dalam memberikan informasi kepada peneliti.

CATATAN LAPANGAN

Observasi : 8
Hari, Tanggal : Kamis, 19 Februari 2015
Waktu : 17.00 – 17.45 WIB
Tempat : Surosutan
Kegiatan : Wawancara kepada Peserta Diklat KUBE
Deskripsi :

Peneliti datang menemui Ibu “DN” di rumahnya yang berada di Perumahan Surosutan Indah Yogyakarta. Sebelumnya peneliti telah membuat janji kepada Ibu “DN”. Ibu “TH” merupakan salah satu peserta Diklat bagi Pendamping KUBE yang berasal dari kota Yogyakarta, beliau saat ini juga merupakan pendamping KUBE di kelurahan Kraton, Yogyakarta. Peneliti mencari informasi tentang bagaimana pelaksanaan diklat yang pernah diikuti serta apa yang dirasa kurang dalam pelaksanaan diklat.

Setelah dirasa cukup peneliti mohon pamit kepada Ibu “DN” dan mengutarakan niat untuk melakukan wawancara lanjutan apabila saat pengolahan data, informasi yang didapat dirasa kurang.

CATATAN LAPANGAN

Observasi : 9
Hari, Tanggal : Senin, 23 Februari 2015
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : BBPPKS Yogyakarta
Kegiatan : Dokumentasi sarana prasarana
Deskripsi :

Peneliti datang ke BBPPKS yang berada di kampus veteran Yogyakarta dimana kantor ini merupakan kantor lama. Di veteran peneliti datang menemui penjaga balai dan pegawai BBPPKS yang berada disana untuk minta ijin mengambil foto sebagai lampiran dalam penelitian ini.

Setelah mendapat ijin, peneliti mengambil gambar ruang makan, asrama tempat menginap para peserta, ruang kelas, aula, dan ruang kesekretariatan. Setelah dirasa cukup peneliti mohon pamit dan berterima kasih kepada pegawai BBPPKS telah diijinkan mengambil gambar.

LAMPIRAN 3. REDUKSI, *DISPLAY*, DAN KESIMPULAN

REDUKSI, *DISPLAY*, DAN KESIMPULAN

No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping KUBE	Apa saja proses perencanaan diklat pemantapan pendamping KUBE?	<p>Bapak SD : perencanaan program diklat sepenuhnya dilaksanakan oleh pusat sedangkan dari kami sebelumnya melakukan rapat koordinasi untuk mengatur jadwal harian dan jadwal pelaksanaannya, tempat dan narasumber untuk peserta selain itu kami hanya menyiapkan panitia. Jadi ya bisa dikatakan kita terima perintah dari pusat bagaimana metode, materi, media dan sumber belajarnya.</p> <p>Bapak UH : sebelum diklat dilaksanakan kami para widyaiswara yang mendapat tugas dari pak kepala untuk mengisi materi juga mempersiapkan diantaranya kami melakukan rapat koordinasi dengan widyaiswara yang lain kemudian kami menyusun rancang bangun pembelajaran atau RPP, kemudian menyusun bahan ajar dan menyusun bahan tayang yang nantinya kita presentasikan saat diklat</p>	<p>Perencanaan program diklat sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusdiklat Kesejahteraan sosial. Di BBPPKS sendiri pihak penyelenggara melakukan persiapan dengan mengatur jadwal harian dan jadwal pelaksanaan, tempat, narasumber dan panitia. Sedangkan widyaiswara melakukan persiapan dengan menyusun rancang bangun pembelajaran atau RPP.</p>

No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
		Bagaimana proses perekrutan peserta Diklat?	<p>Bapak SD : proses perekrutan peserta diklat sepenuhnya juga dilaksanakan pusat yang memberikan pengumuman kepada dinas-dinas sosial di kabupaten atau kota. Kami hanya menerima data peserta yang sudah lolos tes.</p> <p>Ibu TH: kemarin ketika pelaksanaan diklat saya langsung dipanggil oleh dinas sosial dan mendapat surat tugas untuk ikut diklat, kebetulan saya sudah lumayan lama jadi pendamping tapi belum ikut diklat ini.</p> <p>Ibu DN : awalnya saya ikut tes kemudian dapat surat panggilan untuk ikut diklat semua proses itu dilaksanakan oleh dinas sosial yang dapat tugas dari pusat dek</p>	Proses perekrutan peserta diklat dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Sosial Kabupaten atau Kota yang mendapat tugas dari pusat selanjutnya data calon pendamping KUBE yang dinyatakan lolos seleksi diserahkan kepada pihak BBPPKS untuk dipanggil mengikuti diklat .
No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
		Bagaimana penentuan widyaiswara dalam diklat pemantapan pendamping KUBE?	<p>Bapak SD : widyaiswara untuk diklat kami pilih dari widyaiswara yang sudah mengikuti TOT pendamping KUBE di pusat</p> <p>Bapak UH : kami yang dipilih untuk jadi WI adalah yang sudah mengikuti pernah dan lulus TOT pendamping KUBE.</p>	widyaiswara yang mengisi materi dalam diklat pemantapan pendamping KUBE adalah yang pernah mengikuti dan lulus dalam <i>Training Of Trainer</i> (TOT)

No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
		Apa saja kriteria widyaiswara?	<p>Bapak SD : kriteria widyaiswara adalah yang sudah ikut TOT dan memiliki sertifikat kelulusan TOT pendamping KUBE</p> <p>Bapak UH : yang menjadi widyaiswara harus punya sertifikat lulus TOT ya bisa dikatakan sertifikat itu SIM buat kami ngajar</p>	kriteria widyaiswara yang akan mengisi diklat adalah yang telah memiliki sertifikat lulus dari TOT pendamping KUBE yang telah diikuti
No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
		Bagaimana proses pelaksanaan diklat pemantapan pendamping KUBE?	<p>Bapak SD : setelah semua persiapan telah selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan diklat dimana pelaksanaan diklat melalui beberapa tahapan yaitu penerimaan peserta yang dilanjut dengan pengarahan program, acara pembukaan , dinamika kelompok, penyampaian materi, PBL, yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi.</p> <p>Bapak UH : pelaksanaan diklat dimulai dari peserta melakukan daftar ulang kemudian ada pengarahan program setelah itu dilanjutkan dengan dinamika kelompok, acara inti, PBL dan</p>	pelaksanaan Diklat Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE dilaksanakan setelah semua perencanaan atau persiapan telah selesai dilakukan. Pelaksanaan Diklat meliputi kegiatan panitia (kesekretariatan), acara pembukaan, dinamika kelompok, sesi penyampaian materi, praktek belajar lapangan, dan pelaksanaan evaluasi.

			acara terakhir acara penutupan sekaligus ada evaluasi	
			Ibu DN : pelaksanaan pertama daftar ulang sebagai peserta ada dinamika kelompok kemudian penyampaian materi terus kunjungan ke KUBE yang terakhir ada evaluasi	
No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
		Bagaimana perumusan kurikulum diklat pemantapan pendamping KUBE?	<p>Bapak UH : materi semua dibuat oleh pusdiklat dimana materinya disesuaikan dengan kebutuhan peserta untuk melakukan pendampingan nantinya. Materinya seputar tentang bagaimana mekanisme program dilaksanakan di lapangan</p> <p>Bapak SD : untuk kurikulum kami semua mengikuti dari pusat dan kami hanya menjalankan saja</p>	Materi yang disampaikan dalam diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE disusun oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta ketika peserta terjun untuk mendampingi KUBE di masyarakat.
No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
		Apa saja media pembelajaran yang digunakan?	Bapak UH : media pembelajaran yang digunakan ada modul, <i>flip chart</i> , laptop, kami juga menggunakan film atau video agar peserta tidak cepat bosan	media pembelajaran yang digunakan dalam diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE adalah modul berisi materi KUBE,

			Ibu DN : untuk media pembelajaran cukup membantu kami dalam memahami materi yang disampaikan widyaiswara jadi kami tidak hanya mendengar tapi juga bisa baca. Media yang digunakan ada modul, laptop, LCD, <i>flip chart</i> , kertas plano, film juga	laptop, LCD, <i>flip chart</i> , kertas plano, dan film atau video.
No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
		Bagaimana metode pembelajaran diklat pemantapan pendamping KUBE?	<p>Bapak UH : metode yang digunakan dalam diklat menggunakan metode <i>andragogy</i> dimana widyaiswara hanya memfasilitasi. Metode ini bertujuan membuat peserta lebih aktif dan partisipatif, dalam setiap pembelajaran kami mengemas materi melalui permainan dan kasus yang harus dipecahkan oleh peserta</p> <p>Ibu TH : metodenya saya rasa kemarin banyak materinya jadi kami ya mendengarkan sambil mengantuk gitu tapi untungnya ada widyaiswara yang tanggap ketika peserta mengantuk langsung dikasih <i>ice breaking</i> atau nonton video</p>	metode yang digunakan dalam diklat yaitu metode pembelajaran orang dewasa (<i>andragogy</i>) dimana pembelajaran menekankan pada partisipasi aktif dan pemanfaatan pengalaman peserta. Namun pada pelaksanaannya peserta merasa diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE terlalu banyak materi sehingga menyebabkan peserta mudah bosan.

			Ibu DN : metodenya kemarin ada teori ada diskusi dari suatu kasus juga pokoknya peserta dibuat aktif bertanya dan peserta juga harus melakukan presentasi	
No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
		Bagaimana proses evaluasi diklat pemantapan pendamping KUBE?	<p>Ibu TH: evaluasi untuk peserta ada dua yaitu <i>pra test</i> dan <i>post test</i>. <i>Pra test</i> dilaksanakan pas awal sebelum diklat materinya tentang KUBE secara umum kalo <i>post test</i> dilaksanakan akhir diklat materinya tentang diklat yang dilaksanakan selain itu ada juga evaluasi untuk pelaksanaan diklat mulai dari prosesnya, sarprasnya sama widyaiswaranya</p> <p>Bapak UH : evaluasi ada tiga untuk peserta, penyelenggara, dan untuk widyaiswara. Evaluasi digunakan untuk bahan perbaikan diklat mendatang</p>	evaluasi diklat dibedakan menjadi tiga yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap widyaiswara, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kritikan, kekurangan, dan saran yang dapat dijadikan acuan perbaikan untuk pelaksanaan diklat selanjutnya.
No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
		Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan diklat pemantapan pendamping	Bapak SD : koordinasi yang baik dengan dinsos di kabupaten / kota menjadi salah satu faktor pendukung yang kami rasakan dengan	faktor pendukung program diklat bimbingan pemantapan pendamping KUBE meliputi

		KUBE?	koordinasi yang baik akan memudahkan kami untuk mendapatkan data tentang calon peserta yang telah lolos seleksi dan siap mengikuti diklat Ibu TH: sarana prasarana dan fasilitas yang disediakan BBPPKS sudah lengkap dik ada laptop, LCD, flipchart, modul yang sangat membantu kami untuk memahami materi yang disampaikan. Ruang kelas dan kamarnya juga sudah enak ada AC	adanya koordinasi yang baik antara BBPPKS dengan instansi terkait di provinsi,kabupaten / kota dan faktor kedua yaitu sarana dan prasarana yang disediakan sudah memadai.
No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
		Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan diklat pemantapan pendamping KUBE?	<p>Bapak SD : yang jadi faktor penghambat mungkin dari sarana prasarananya kurang modern missal LCD kadang tidak jelas kemudian <i>microphone</i> juga kurang bagus sering mendengung saya rasa ini membuat peserta jadi kurang nyaman. Namun itu semua tidak menjadi kendala yang berarti</p> <p>Ibu DN : kalo saya sih merasanya faktor penghambat gag ada dek paling ya kemarin micnya itu bunyi kresak-kresak gitu aja sih</p>	faktor penghambat program yaitu sarana prasarana yang dimiliki BBPPKS kurang modern missal di LCD yang gambarnya kurang bagus dan di <i>microphone</i> yang sering mendengung ketika digunakan.

No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
2.	Dampak diklat pemantapan pendamping KUBE	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah pendamping mengikuti diklat?	<p>Ibu TH: setelah diklat kami jadi semakin bertambah wawasan tentang KUBE sehingga ketika ada masalah kami dapat mengatasinya selain itu kami jadi punya banyak teman pendamping di berbagai wilayah Indonesia. Kami sering mengadakan diskusi, <i>sharing</i>, dan berbagi informasi tentang apapun melalui media sosial</p> <p>Ibu DN : dampak yang saya rasakan pribadi sih mungkin pengetahuan tentang KUBE menjadi bertambah, saya kan termasuk pendamping baru yang belajar KUBE dari nol kemudian dari segi ketrampilan juga insyaallah bermanfaat untuk dampingan saya</p> <p>Ibu AN : Ibu TH mendampinginya baik dan selalu hadir tiap ada pertemuan kelompok yang diadakan sebulan sekali. Kalo anggota ada kesulitan juga ibu TH selalu memberikan solusi kepada kami</p>	dampak yang dirasakan oleh peserta KUBE maupun oleh anggota KUBE yang merupakan dampingan dari peserta diklat. dampak yang dirasakan yaitu pengetahuan dan ketrampilan peserta tentang KUBE menjadi bertambah, peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki setelah diklat untuk proses pendampingan. Dampak selanjutnya yang dirasakan anggota KUBE yaitu pendamping menjadi lebih interaktif, disiplin

No.	Komponen	Pertanyaan	Reduksi	Kesimpulan
		Apa saja prestasi yang didapatkan oleh KUBE setelah pendamping mengikuti diklat?	<p>Ibu DN : kalo dampak dari segi prestasi yang bisa dilihat yaitu KUBE Kraton menjadi percontohan kemudian kami sering menang lomba kreasi dari usaha pengelolaan sampah yang kami jalankan dan setiap tahunnya alhamdulillah ada pengembangan modal</p> <p>Ibu TH : prestasi KUBE kami, kami sudah mendapat bantuan untuk KUBE ini sebanyak dua kali untuk 5 kelompok kemudian dari kementerian sosial dua kali berkunjung di KUBE kami.</p>	prestasi yang diraih oleh KUBE Kraton yaitu menjadi KUBE percontohan dan menang dalam berbagai lomba kreasi pengelolaan sampah. Sedangkan untuk KUBE Rejowinangun sudah dua kali mendapat bantuan untuk KUBE dan mendapat kunjungan dari Kementerian Sosial.

LAMPIRAN 4. DATA SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Kepala BBPPKS	Drs. Nur Pujiyanto,M.Si	Kepala BBPPKS
2	Bagaian Tata Usaha	Dra. Pristi Yudawati, MM	Kepala Bagian TU
		Suharyati, A. Ks, M.Si	Kepala Sub BagianTU
		Endang Pretiningsih	Sekretaris Pimpinan
		Mustadji, SH	Penyusun Laporan Pengelola Inventaris
		Suklan Setaji, S.ST Priyanto,S.Sos Suharto	Penata Laporan BMN dan Barang
		Sangadi, A.Ks Totok Sumardianto, S.ST Wiwara Utami, S.ST Purwanto, S.Sos Agus Wiyono	Pengelola Inst.Lab. Praktikum Peksos dan Media
		Mustajam M. Zainuri Bagiono Paijo Sudaryadi Tri Wijiatmoko Wawan Triono Murgianto Rokhmat Mardi Marsiti	Satpam Pemeliharaan Kantor

3.	Keuangan	Ali M. Simamora, SE, MM	Kasubag Keuangan
		Yatini, S.ST	Bendahara Pengeluaran
		Tri Sutarti Pujiastuti, S.ST	Bendahara Penerimaan
		Budiarso, SH	Verifikator Keuangan
		Pono	Penata Laporan Keuangan
		Nuraeni Dramayanti, S,Sos,MPA	Penata Laporan Keuangan
		Karningsih	Pengelola Anggaran Belanja Pegawai
4.	Bidang Program dan Evaluasi	Drs. Purnamasidi, MM	Kepala Bidang
		Neni Rohaeni, S.Sos, M.Si	Kepala Seksi Penyusunan Program
		Umi Lestari, SH Rr. Wigit Satyrini, SE Wahyuni, SE	Penganalisis Kebutuhan Diklat
		Suyono	Penyelenggara Layanan Informasi dan Advokasi
		Avianto Yudi Astowo	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
		Suramto, S.Ag, MM	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi
		Dra. Dewi Setyorini Diani Endang Andonowati, SE	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan

		Heriyanto, S.IP, M.Si	
		Supriyanto, S.Sos Mulyanti B. S.ST Ana Sukaton, S.IP, MPA	Pengolah Data Hasil Evaluasi dan Pelaporan
		Ruswanto, S.Sos Sri Rahayu, S.ST Nuryadi, S.Sos	Pengelola Ins. Perpustakaan
5.	Bidang Penyelenggara Diklat dan Kerjasama	Dra. Suryak	Kepala Bidang
		Dra. Ening Suryantini	Kepala Seksi Diklat TKSP
		Dra. Hardaya Sudarwo, S.Sos Basiran, SIP	Penyiap Bahan Penyelenggaraan Diklat TKSP
		Sigit Priyantomo	Pelaksana Urusan Kerjasama Diklat TKSP
		Slamet	Admistrasi Diklat TKSP
		Drs. Sudira, M.Si	Kepala Diklat TKSM
		Drs. Amirudin, MPSSp Dra. Rahma Poespita Joenita Anis Rahmawati, S.Sos	Penyiap Bahan Diklat TKSM
		Siti Juwantiyah	Admistrasi TKSM
		Heru Widianoro, Aks ,M.Si Achmad Buchtory, S.Sos	Widyaiswara Pelaksana
6.	Widyaiswara	Drs. Joko Sulisty, M.Si Drs. Uji Hartono, MA Dra. Purwatiningsih, M.Si	WI Madya

		Ir. Titiek Surani, MM Drs. Joko Sumarno, M.Si Drs. Bambang Tjahjono, M.Pd Dinah Pangestuti, M.Si Joko Wiweko Karyadi, M.Pd	
		Dra. Supartini, M.Si Siti Mulyani, M.Si Dra. Prih Wardoyo, MPA	WI Muda
7.	Pejabat Fungsional	A.Wisnu Wardhana, SH Dra. Sri Sugiarti Suradi, S.Pd	Peksos Madya
		Drs. Widjaja	Peksos Muda
		Drs. Sriyana, M.Si Eko Budi Hartati, M.Si Drs. Suminto, M.Si	Perencana Madya
		Drs. Anwar Rosyid	Pranata humas Muda
		Kasdi Wahab, M.Si	JF. Pranata Komputer Muda
		Trimiyati, MA	Pustakawan Muda

Sumber : Data Primer BBPPKS Yogyakarta

LAMPIRAN 5. KURIKULUM DIKLAT PEMANTAPAN PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA

No	Inti	Jamlat
1	Kebijakan penanggulangan kemiskinan	3
2	Filosofi KUBE	3
3	Kelembagaan dan pengorganisasian KUBE	4
4	Need Assesment penentuan UEP	4
5	Skema bantuan stimulant	3
6	Pengelolaan dan pengembangan UEP	4
7	Pengendalian	3
8	Pendampingan sosial	5
9	Kepemimpinan masyarakat	4
10	Kewirausahaan	5
11	Motivasi dan pengembangan komitmen	4
	Jumlah	42
Penunjang		
1	Dinamika kelompok	4
2	PBL	8
	Jumlah	12
Lain-lain		
1	Pembukaan / penutupan	2
2	Pra / purna tugas	2
3	Evaluasi penyelenggaraan	1
4	Pengarahan program	1
	Total	60

Sumber : Data Primer BBPPKS Yogyakarta

LAMPIRAN 6. DOKUMENTASI

1. Fasilitas dan Sarana Prasarana di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta



Asrama untuk peserta Diklat



Ruang Makan



Ruang Aula



Ruang Kelas



Ruang Sekretariat



Gazebo



Lapangan



Perpustakaan



Ruang Tamu



Sound System



Sarana Prasarana Dalam Kelas

2. Perencanaan Penyelenggaraan Program Diklat



Koordinasi awal dan pembentukan panitia



Penjadwalan



Penentuan Narasumber atau widyaiswara oleh panitia penyelenggara diklat

3. Pelaksanaan Diklat Pemantapan Pendamping KUBE



Dinamika Kelompok



Proses Pembelajaran Oleh Widyaiswara



Ice Breaking di Sela Pembelajaran



Proses Praktek Belajar Lapangan

4. Dampak Penyelenggaraan Program Diklat Pemantapan Pendamping KUBE



LAMPIRAN 7.
SURAT-SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 59 / 2015

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman

Nomor : 070/Kesbang/58/2015

Tanggal : 09 Januari 2015

Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : AJENG APRILIANA NUR ICM
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 11102241018
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Karangmalang, Yogyakarta
Alamat Rumah : Mantren, Karangrejo, Magetan, Jatim
No. Telp / HP : 085790675101
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDAMPING
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI BALAI BESAR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YOGYAKARTA**
Lokasi : Balai Besar Pend. & Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kalasan sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 09 Januari 2015 s/d 10 April 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 9 Januari 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Sosial Kab. Sleman
4. Balai Besar Pend. & Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kalasan
5. Camat Kalasan
6. Dekan FIP UNY
7. Yang Bersangkutan



ERNY MARYATUN, S.I.P, MT
Pembina, IV/a



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp.(0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094
Telp.(0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295,344, 345, 366, 368,369, 401, 402, 403, 417)



Certificate No. QSC 00687

No. : 008 /UN34.11/PL/2015
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

7 Januari 2015

Yth .Kepala Balai Besar Pendidikan dan Latihan
Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
Jl.Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Ajeng Apriliana Nur Icmi
NIM : 11102241018
Prodi/Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah/PLS
Alamat : Ds. Mantren RT 01 RW 02 Karangrejo Magetan Jawa Timur

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
Subyek : Penyelenggara Diklat, Fasilitator, Pendamping KUBE, Anggota KUBE
Obyek : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendamping Kelompok Usaha Bersama
Waktu : Januari -Maret 2015
Judul : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP 19600902 198702 1 0014

Tembusan Yth:

- 1.Rektor (sebagai laporan)
 - 2.Wakil Dekan I FIP
 - 3.Ketua Jurusan PLS FIP
 - 4.Kabag TU
 - 5.Kasubbag Pendidikan FIP
 - 6.Mahasiswa yang bersangkutan
- Universitas Negeri Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 540611, Dekan Telp. (0274) 520094
Telp. (0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295, 344, 345, 366, 368, 369, 401, 402, 403, 417)



Certificate No. QSC 00687

No. : 008 /UN34.11/PL/2015
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

7 Januari 2015

Yth. Bupati Sleman
Cq. Kepala Kantor Kesbang Kabupaten Sleman
Jalan Candi Gebang, Beran, Tridadi, Sleman
Phone (0274) 868504 Fax. (0274) 868945
Sleman

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Ajeng Apriliana Nur Icmi
NIM : 11102241018
Prodi/Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah/PLS
Alamat : Ds. Mantren RT 01 RW 02 Karangrejo Magetan Jawa Timur

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
Subyek : Penyelenggara Diklat, Fasilitator, Pendamping KUBE, Anggota KUBE
Obyek : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendamping Kelompok Usaha Bersama
Waktu : Januari -Maret 2015
Judul : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Dekan
Dr. Maryanto, M. Pd.
NIP 19600902 198702 1 0017

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan PLS FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

No : 297 /BBPPKS.TU.1/04/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Nur Pujiyanto, MSi
NIP : 19611208 198803 1 001
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala BBPPKS Yogyakarta

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Ajeng Apriliana Nur Icmi
NIM : 11102241018
Prodi/Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah / PLS
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian tugas akhir skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendamping Kelompok Usaha bersama (KUBE) di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta terhitung mulai bulan Januari s/d Maret 2015.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 April 2015
Kepala

Nur Pujiyanto

